LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

2019

P E N G A N T A R

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Tahun 2019 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2019, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan LKJIP ini dapat menjadi bahan masukkan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Surabaya, Februari 2020

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, S.E., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 198903 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur adalah meningkatkan daya saing industri manufaktur dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Struktur perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2019 kedua sektor tersebut berkontribusi sebesar 48,70 persen. Artinya bahwa sektor industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian Jawa Timur.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mendapat predikat dengan Kategori **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran Strategis : Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim dengan kategori **sangat baik.**

TUJUAN 2 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 3 (tiga) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama.

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase

Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas dengan kategori **sangat baik.**

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah dengan kategori **sangat kurang.**
- Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama : 1. Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk dengan kategori **sangat baik**; 2. Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar dengan kategori **sangat baik.**

DAFTAR ISI

		Hal
PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GRAFIK		viii
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Struktur Organisasi	1
	1.2 Tugas dan Fungsi	2
	1.2.1 Tugas	2
	1.2.2 Fungsi	2
	1.2.3 Peran Strategis	6
	1.3 Isu Strategis	7
	1.4 Cascading Kinerja	11
	1.5 Peta Proses Bisnis	15
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	18
	2.1 Rencana Strategis	18
	2.2 Rencana Kerja	23
	2.3 Perjanjian Kinerja 2019	23
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	25
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019	25
	3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019	26
	3.2.1 Sasaran Strategis Satu	27
	3.2.1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan thd PDRB ADHB Jatim	29

3.2.2 Sasaran Strategis Dua 52
3.2.2.1 Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas…… 54
3.2.3 Sasaran Strategis Tiga 66
3.2.3.1 Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah …… 68
3.2.4 Sasaran Strategis Empat 75
3.2.4.1 Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk ……. 77
3.2.4.2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar …….. 78
3.3 Akuntabilitas Keuangan..... 89
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) TAHUN 2018 89
3.3.2 Realisasi APBD Tahun 2018 ……..... 90
3.3.3 Realisasi APBN Tahun 2018 91

BAB IV **PENUTUP** 92
4.1 Kesimpulan 92
4.2 Permasalahan dan Kendala 94
4.3 Rekomendasi 96

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Indag Tahun 2014-2019……..…	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	24
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Disperindag Prov. Jatim Tahun 2019.....	25
Tabel 3.2	Sasaran Strategis 1 Tingkat Capaian Kinerja thn 2014-2019.....	27
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2019…….....	27
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I.....	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD……..	28
Tabel 3.6	Alokasi Per Sasaran Pembangunan ……	28
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Caapaian Nasional ……...	28
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ……	29
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……...	29
Tabel 3.10	Perkembangan Kondisi Industri Pengolahan Jatim thn 2013-2019…….	32
Tabel 3.11	Ekspor Komoditi Utama Tahun 2018……..……..	34
Tabel 3.12	Fasilitasi Standardisasi Produk IKM/Perusahaan Di Jatim Th 2014-2019...	36
Tabel 3.13	Fasilitasi KI Produk IKM/Perusahaan Di Jatim Th 2014-2019……..	36
Tabel 3.14	Sasaran Strategis 2 ……...	52
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019…….....	52
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2……	52
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD ……..……	53
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional……	53
Tabel 3.19	Alokasi Per Sasaran Pembangunan ……	53
Tabel 3.20	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran……..	53
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……	54
Tabel 3.22	Neraca Perdagangan Luar Negeri Non Migas Jatim thn 2018 – 2019…….	54
Tabel 3.23	Neraca Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur Th. 2018-2019 ……	57
Tabel 3.24	Daftar Negara Asal Impor Non Migas……	58
Tabel 3.25	Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Jatim terhadap ekspor Impor Non Migas Nasional (Tahun 2011-2019)……..	64
Tabel 3.26	Sasaran Strategis 3 …… …	66
Tabel 3.27	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi 3 Tahun 2019 ….....……	66
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 …….	66
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja s.d.Akhir Periode RPJMD ……..	67

Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional …….	67
Tabel 3.31	Alokasi Per Sasaran Pembangunan ……..……...	67
Tabel 3.32	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran……...	68
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …….…….	68
Tabel 3.34	Sasaran Strategis 4 …….…….	75
Tabel 3.35	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019 …….	75
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 …….	76
Tabel 3.37	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD ……..…	76
Tabel 3.38	Alokasi Per Sasaran Pembangunan …….…….	76
Tabel 3.39	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ……...	76
Tabel 3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …….…….	77
Tabel 3.41	Perkembangan Sertifikasi Mutu Komoditi / Produk Tahun 2011 – 2019 …	78
Tabel 3.42	Perkembangan Kinerja UPT PK Tahun 2017 – 2019…….	79
Tabel 3.43	Penerimaan PAD Disperindag Prov Jatim Tahun 2019 ….....	89
Tabel 3.44	Realisasi APBD 2019……..……	90
Tabel 3.45	Realisasi APBN Tahun 2019…….	91

DAFTAR GRAFIK

No.	Nama Grafik	Hal
Grafik 3.1	Kontribusi Industri Pengolahan Jatim Thd Nasional Thn 2013 – 2019 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Jatim & Nasional ……	30
Grafik 3.2	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Jatim terhadap Nasional tahun 2013-2019..……..……...	69
Grafik 3.3	Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri Jatim Thn 2012–2019…...	70

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Grafik	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Disperindag Prov. Jatim ……...	1
Gambar 1.2	Skema lingkup AEC……...	8
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis Level 0……...	15
Gambar 1.4	Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses utama……...	16
Gambar 1.5	Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses manajerial…….....	17
Gambar 1.6	Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses pendukung……..……	17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2018, terdiri dari 1 unit eselon II, 20 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 5 Bidang yang menangani Industri dan perdagangan, 14 UPT, dan kelompok fungsional. Adapun bagan organisasinya sbb :

Gambar 1.1. STRUKTUR DISPERINDAG PROV. JATIM

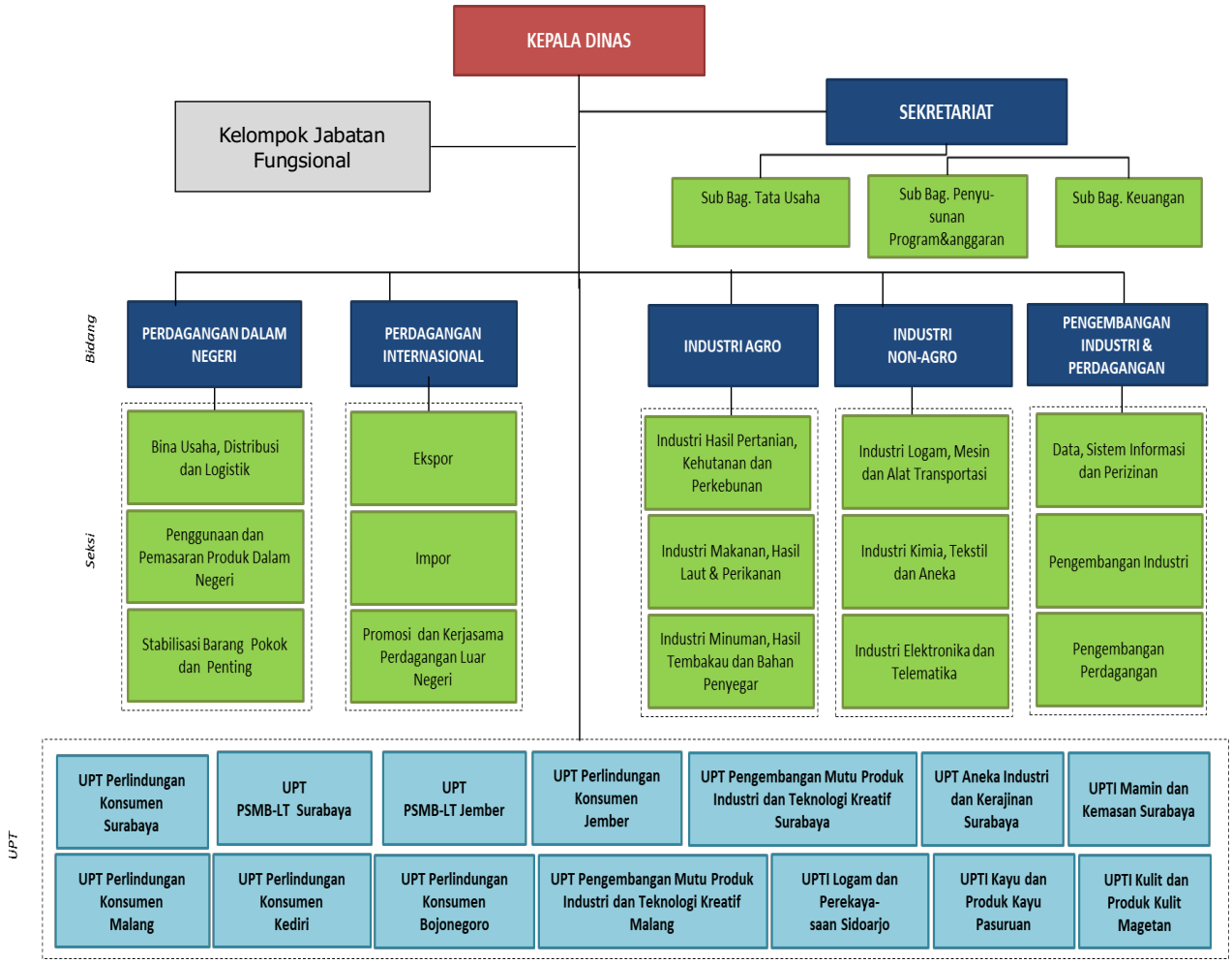

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1.2.1 Tugas.

Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No. 68 tahun 2016 tanggal 27 September 2016, dalam Bab III Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa ***"Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang perindustrian dan perdagangan".***

1.2.2 Fungsi

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya..

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1) ***Sekretariat***, dengan tugas "Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol".

2) ***Bidang Industri Agro***, dengan tugas "Menyelenggaran perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar".

3) ***Bidang Industri Non Agro***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis industri logam, mesin dan alat transportasi, industri kimia, tekstil dan aneka, serta industri telematika".

4) ***Bidang Perdagangan Dalam Negeri***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta barang kebutuhab pokok dan barang penting".

5) ***Bidang Perdagangan Internasional***, dengan tugas "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional".

6) ***Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan***, dengan tugas *"Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama sektor industri dan perdagangan, serta pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta memberikan rekomendasi penerbitan perizinan industri dan perdagangan"*

7) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya***, dengan tugas "Melaksanakan sebagian tugas Dinas

dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

8) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember***, dengan tugas "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

9) ***UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

10) ***UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

11) ***UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

12) ***UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

13) ***UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

14) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".

15) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".

16) ***UPT Perlindungan Konsumen Surabaya***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya".

17) ***UPT Perlindungan Konsumen Malang***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang".

18) ***UPT Perlindungan Konsumen Jember***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember".

19) ***UPT Perlindungan Konsumen Kediri***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri".

20) ***UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro***, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro".

1.2.3 PERAN STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri manufaktur di Jawa Timur melalui:
   a) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
   b) Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
   c) Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
   d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
   e) Peningkatan Standarisasi Industri;
   f) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan pengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas / tujuan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 yaitu **meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri serta meningkatkan percepatan kinerja sektor industri.**

1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 Identifikasi Permasalahan

1.3.1.1 Permasalahan Terkait Urusan Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
b. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)
c. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli
d. Masih tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut di wilayah Indonesia.
e. Masih maraknya produk Impor yang tidak sesuai dengan standar, wajib label bahasa Indonesia, serta manual dan kartu garansi

1.3.1.2 Permasalahan Terkait Urusan Perindustrian

Beberapa permasalahan terkait urusan perindustrian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor
b. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
c. Hambatan peningkatan efisiensi produksi
d. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah
e. Regulasi kawasan industri yang menghambat pengembangan kawasan industri
f. Masih mahalnya harga Energi Primer (gas dan listrik) sebagai sumber energi Industri

1.3.2 Isu Regional

Isu regional yang terkait dengan pembangunan industri dan perdagangan di Jawa Timur adalah adanya *Asean Economic Community* (AEC). AEC merupakan tantangan daya saing ekonomi nasional maupun Jawa Timur. Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Skema Lingkup AEC

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, dibutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non–tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain–lain, yang dapat menganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

1.3.3 Isu Nasional

a. Amanat Undang-Undang terkait Pembangunan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
b. Pengembangan perwilayahan industri;
c. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
d. Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;

e. Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
f. Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

c. Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

1.3.4 Isu Jawa Timur

a. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat

pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Dalam konteks perindustrian dan perdagangan, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat diwujudkan dengan prioritas pengembangan IKM, industri agro, dan revitalisasi pasar tradisional.

b. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

1.4 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

1.4.1. Visi, Misi Jawa Timur 2014-2019

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Pada Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019, visi dan misi pembangunan Jawa Timur tidak mengalami perubahan. Visi pembangunan

Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah **Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak.**

Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut diupayakan melalui lima misi yang diberi judul **Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik**. Kelima misi tersebut adalah :

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial;

Selaras dengan visi, misi pembangunan Provinsi Jawa Timur di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur adalah salah satu unsur penting Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Berpijak pada tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam mendukung pencapaian misi kedua. Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. *Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.*

   Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Jawa

Timur merupakan IKM. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

b. *Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri*

Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi lain melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai tahun 2013, telah dibuka 26 KPD di berbagai provinsi mitra.

c. *Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi*

Daya saing sektor industri dan perdagangan Jawa Timur harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam integrasi ekononomi global.

1.4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Misi kedua Perubahan RPJMD Jawa Timur 2014-2019 dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan. Pencapaian tujuan ini diukur menggunakan indikator pertumbuhan PDRB (laju pertumbuhan ekonomi) Jawa Timur. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan misi kedua Perubahan RPJMD Jawa Timur 2014-2019 adalah:

1. Meningkatnya ketahanan pangan;
2. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terkait erat dalam pencapaian sasaran ke-2 Perubahan RPJMD Jawa Timur 2014-2019: meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator pencapaian sasaran:

1. Persentase share net-ekspor pada PDRB menurut penggunaan
2. Persentase pertumbuhan industri

Berdasarkan sasaran Perubahan RPJMD Jawa Timur 2014-2019 di atas, maka tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan share net-ekspor pada PDRB menurut penggunaan
2. Meningkatkan pertumbuhan industri

Adapun arah kebijakan Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang terkait dengan peningkatan kinerja sektor industri dan perdagangan antara lain:

1. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
2. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
3. Peningkatan performa standarisasi Industri
4. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi
5. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro
6. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor
7. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan

1.5 PETA PROSES BISNIS

Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

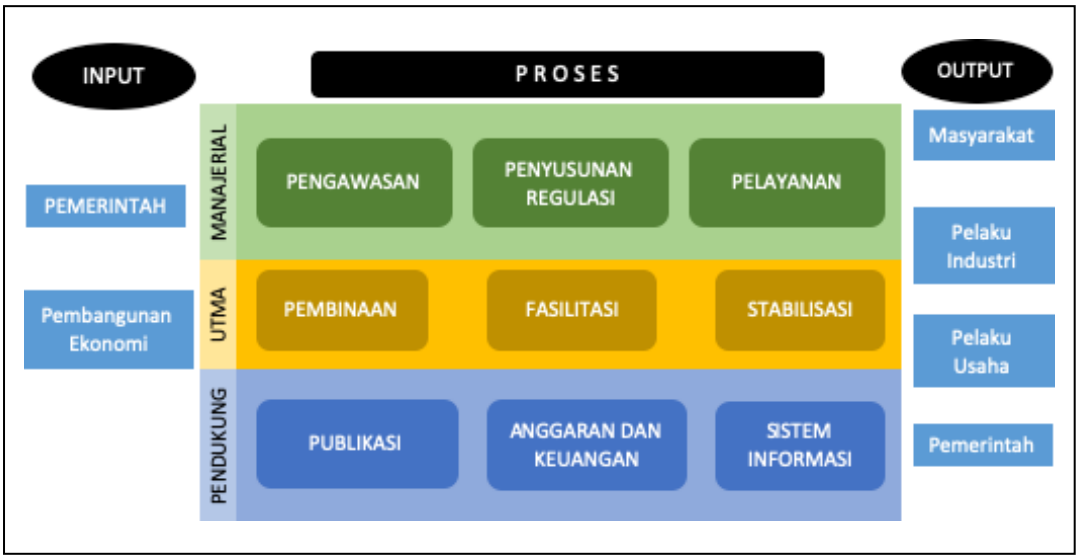

Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Level 0

Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja Dinas yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung.

Mengacu pada dokumen rencana strategis bahwa tujuan dan keluaran utama yang ingin dicapai oleh organisasi adalah meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sehingga proses pembinaan, fasilitasi dan stabilisasi sebagai proses utama kepada pemangku kepentingan berperan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal maupun internal instansi pemerintah. Selain itu, pada level ini mempunyai pengaruh secara langsung terhadap keberhasilan organisasi agar bisa memberikan respon secara langsung terhadap permintaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan.

Pelaku industri mendapat pembinaan (pendampingan) secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPT Industri untuk meningkatkan kualitas mutu produk, wawasan atau skill dalam penguasaan peralatan maupun pengetahuan bahan/material. Yang kemudian menjadi masukan pada bidang industri terkait untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan pengembangan industri sesuai komoditi. Kemudian bidang perdagangan terkait bisa memberikan fasilitasi even/penyelenggaraan promosi.

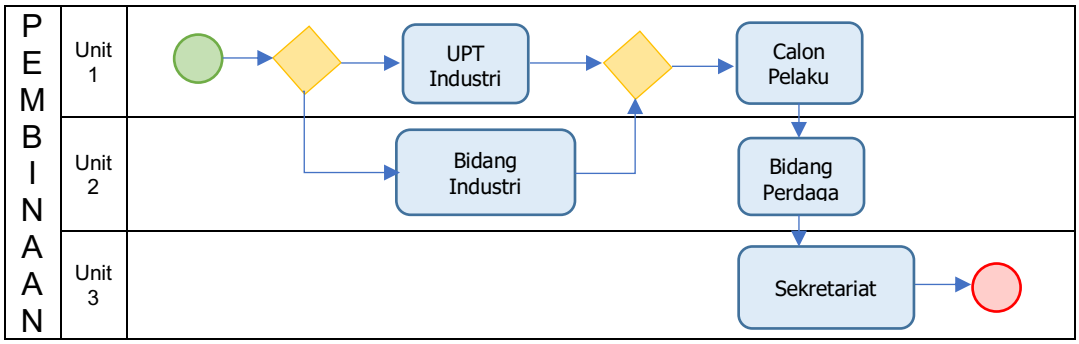

Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Utama

Sedang pada proses manajerial meliputi pengawasan, penyusunan regulasi dan pelayanan. Proses ini berperan dalam mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna/pemangku kepentingan internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sehingga secara langsung dapat melakukan pengawasan rutin kepada Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

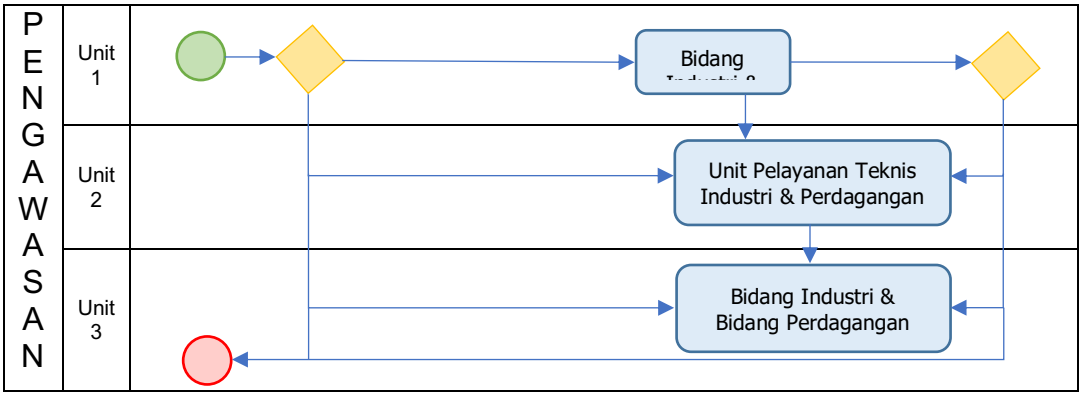

Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Manajerial

Sedang pada proses pendukung, tidak memiliki kaitan secara langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal dan memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Fungsi ini secara umum dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai pintu utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, seperti official website, media sosial resmi serta bentuk informasi lain yang sifatnya informatif kepada masyarakat dan menggambarkan eksistensi dinas secara umum.

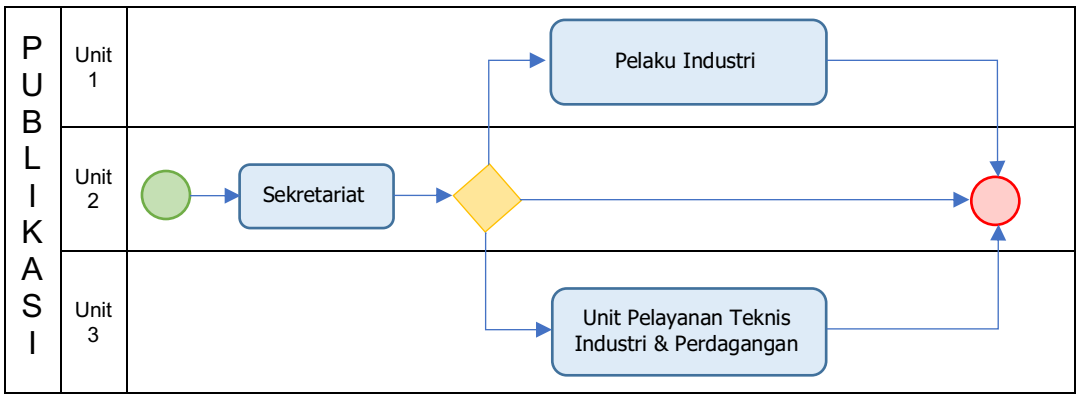

Gambar 1.6 Peta Proses Bisnis Level 1 pada proses Pendukung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi kedua dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah "***Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi***". Dengan tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Perindag Prov. Jatim adalah Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor sektor unggulan (sektor industri dan sektor perdagangan). Dengan sasaran Meningkatnya kontribusi sektor sektor unggulan (sektor industri dan sektor perdagangan) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator sasaran :

1. Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan (%)
2. Persentase pertumbuhan industri pengolahan (%).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kurun waktu 2014-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 tersebut, maka Kepala Dinas telah menetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yaitu ***"Meningkatkan kontribusi sektor industri dan sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi"*** dengan indikator tujuan :

1. Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan (%)
2. Persentase pertumbuhan industri pengolahan (%)

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

***Tujuan 1* : Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan**, sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1) **Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri.** Dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
   - *Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas.*

   Sasaran strategis ini dicapai melalui 1 (satu) program :
   1. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
2) **Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri**.
   Dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
   - *Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Antar Daerah.*

   Sasaran strategis ini dicapai melalui 1 (satu) program :
   1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
3) **Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**. Dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
   - *Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar.*
   - *Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk.*

   Sasaran strategis ini dicapai melalui 2 (dua) program :
   1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
   2. Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

   .

***Tujuan 2* : Persentase pertumbuhan industri pengolahan**, *dengan sasaran :*

1) **Meningkatnya konstribusi sektor industri pengolahan**. Dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- *Persentase kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim.*

Sasaran strategis ini dicapai melalui 5 (lima) program :

1. Program Pengembangan Industri Agro;
2. Program Pengembangan Industri Non Agro;
3. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
4. Program Peningkatan Standarisasi Industri;
5. Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan.

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan dari ketiga belas program tersebut adalah :

Program Prioritas

1. **Program Pengembangan Industri Agro**

   Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan industri agro, meningkatkan nilai tambah produk industri agro, menumbuhkan populasi IKM agro, pemanfaatan sumber daya termasuk Sumber Daya Alam dari Kabupaten/Kota secara optimal juga pengembangan OVOP dari masing-masing Kabupaten/Kota.

2. **Program Pengembangan Industri Non Agro**

   Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan industri non agro, meningkatkan nilai tambah produk industri non agro, menumbuhkan populasi IKM non agro, memanfaatkan sumber daya termasuk Sumber Daya Alam dari Kabupaten/Kota secara optimal juga pengembangan OVOP.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi, baik dalam uji komersialisasi hasil penelitian, dan pengembangan rancangan produk baru, maupun proses produksi serta pemanfaatan sumber daya lokal.

4. **Program Peningkatan Standarisasi Industri**

   Program ini bertujuan meningkatkan perluasan penerapan standardisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri industri kecil dan menengah, mengembangkan industri kreatif dalam rangka menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai permintaan pasar di dalam maupun luar negeri, sekaligus untuk perlindungan konsumen.

5. **Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan**

   Program ini bertujuan meningkatkan penyediaan Kawasan Industri di Jawa Timur serta penataan tata ruang.

6. **Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor**

   Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Jawa Timur, serta meningkatkan peran ekspor barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja.

7. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.**

   Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, tertib niaga, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Jawa Timur.

8. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

   Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis dan bahan pokok penting.

9. **Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

   Program ini bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.

PROGRAM PENUNJANG

10. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

    Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

11. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dibidang teknologi informasi berbasis *fiber optic*.

12. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi perkantoran baik administrasi kepegawaian, keuangan, asset, dll pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

13. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan, sistem pengendalian dan evaluasi serta pelaporan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2014-2019.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran strategis tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri; (2) Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri; (3) Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; (4). Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan.

Tabel 2.1 : Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Indag Tahun 2014-2019 Perubahan

TUJUAN	1. Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan			2. Meningkatkan tertib perdagangan
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri	2. Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri	3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	No.	Indikatator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri	1.	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	%	7
Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri	1.	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	%	4
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.	Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	%	2
	2.	Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk	%	1
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	1.	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	%	28,94

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Jatim Thn 2019

TUJUAN 1 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indikator Tujuan : Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan									
SASARAN STRATEGIS 1 :									
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	28,94	28,90	29,27	28,92	29,3	29,73	30,24	104,49	Sangat Baik
TUJUAN 2 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indikator Tujuan : Persentase Share Net Ekspor Pada PDRB Menurut Penggunaan									
SASARAN STRATEGIS 2 :									
Meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri.									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2) Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	7	-	1114,29	165,88	-77,75	-414,3	127,11	1.815,86	Sangat Baik

SASARAN 3 : Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	4	-	10,52	0,73	49,47	15,7	-4,47	-111,75	Sangat Kurang

SASARAN 4 : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk	1	7,84	3,12	2,42	-36,7	10,9	16,95	1.695	Sangat Baik
1) Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	2	-	-	-	2,03	3,7	3,31	165,5	Sangat Baik

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, terdapat 4 (empat) sasaran strategis, adapun analisa dari keempat sasaran strategis untuk mencapai dua tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan untuk mendukung misi kedua dari RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi , akan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

Untuk dapat mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**28,94**	**28,90**	**29,27**	**28,92**	**29,3**	**29,73**	**30,24**	**104,49**	**Sangat Baik**

Tabel 3.3 : Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**28,94**	**30,24**	**104,49**

Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**28,94**	**29,73**	**30,24**

Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**28,94**	**30,24**	**104,49**

Tabel 3.6 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**48.781.359.312**	**32,54**

Tabel 3.7 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th. 2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**30,24**	**19,7**	- Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2019 mencapai Rp 711,30 trilyun memberikan kontribusi sebesar 30,24 persen terhadap Total PDRB ADHB Jatim yang mencapai nilai sebesar Rp 2.352,43 trilyun pada tahun 2019 - Nilai PDB ADHB sektor industri pengolahan Nasional tahun 2019 mencapai Rp 3.119,6 trilyun memberikan kontribusi sebesar 19,7 persen terhadap Total PDB ADHB Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 15.833,9 trilyun pada tahun 2019 - Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2019 mencapai Rp 711,30 trilyun memberikan kontribusi sebesar 22,80 persen terhadap Nilai PDB ADHB Nasional sektor industri yang mencapai nilai sebesar Rp 3.119,6 trilyun pada tahun 2019

Tabel 3.8 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**28,94**	**30,24**	**104,49**	**48.781.359.312**	**46.447.177.746**	**95,21**

Tabel 3.9 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkat nya kontribusi sektor industri pengolahan	1. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	**104,49**	**95,21**	**9,28**

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 711,30 trilyun atau sebesar 30,24 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 2.352,43 trilyun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 28,94 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kesatu, sehingga persentase capaiannya sebesar 104,49 persen.

Kinerja Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 60,17 Trilyun atau meningkat 9,24 persen jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai nilai Rp 651,13 trilyun.

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur vs Nasional

Grafik 3.1 : Kontribusi Industri Pengolahan Jatim Thd Nasional thn 2013–2019, Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Jatim dan Nasional thn 2013-2019.

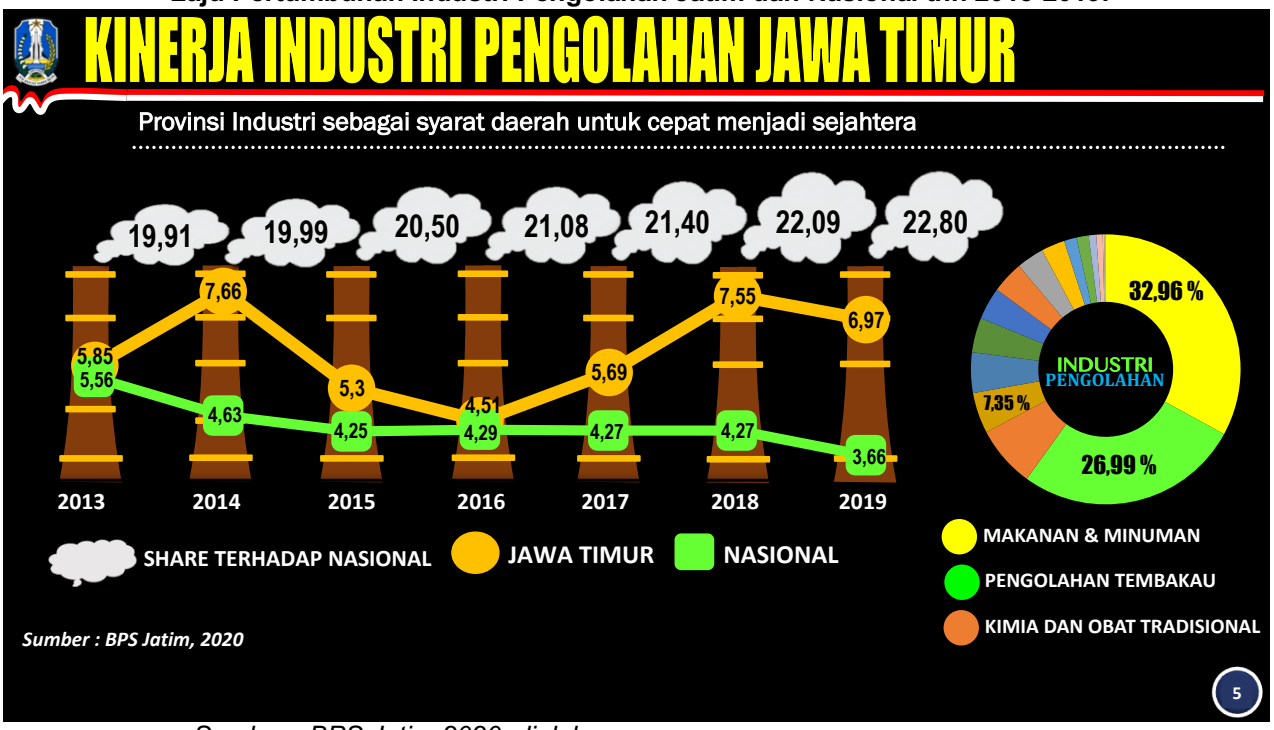

Sumber : BPS Jatim 2020, diolah

Berdasar Data BPS, pada 2019 lalu kinerja perekonomian Jatim berjalan sangat baik. Ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,52 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Pada tahun ini pula, ekonomi Jatim mencatatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 2.352,42 triliun, yang didukung terutama oleh tiga sektor utama yaitu; sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, dengan kontribusi masing-masing berturut-turut sebesar 11,43 persen, 30,24 persen dan 18,46 persen.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai Rp ***711,30 trilyun*** memberikan kontribusi sebesar 22,80 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 3.119,6 trilyun pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur Tahun 2019 berada diatas pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 6,97 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, yaitu sebesar 3,66 persen, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.1 diatas

Adapun arah kebijakan Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang terkait dengan peningkatan kinerja sektor industri dan perdagangan antara lain:

1. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
2. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
3. Peningkatan performa standarisasi Industri
4. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi
5. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro
6. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor
7. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan

Tekait dengan capaian diatas, maka berikut gambaran kondisi sector industri pengolahan di Jawa Timur baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut:

Tabel 3.10 : Perkembangan Kondisi Industri Pengolahan Jawa Timur thn 2013 - 2019

JUMLAH UNIT USAHA, TEANAGA KERJA & NILAI INVESTASI INDUSTRI DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 – 2019

SKALA INDUSTRI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INDUSTRI KECIL							
– Unit Usaha (unit)	785.906	789.837	790.991	791.591	659.967	793,280	794.606
– Tenaga Kerja (orang)	1.806.045	1.815.076	1.821.406	1.825.346	1.490.445	1,835,827	1.843.038
– Nilai Investasi (Milyar Rp)	27.783	27.922	28.096	28.217	24.325	28,457	75.572
– Nilai Produksi (Milyar Rp)	73.057	73.423	73.850	74.133	74.568	75,181	28.562
INDUSTRI MENENGAH							
– Unit Usaha (unit)	16.484	16.566	19.146	20.402	12.509	22,323	23.094
– Tenaga Kerja (orang)	951.666	956.424	961.122	964.871	846.136	969,696	976.272
– Nilai Investasi (Milyar Rp)	18.883	18.977	19.160	19.242	16.054	19,358	57.006
– Nilai Produksi (Milyar Rp	54.811	55.085	55.655	56.154	56.412	56,711	19.524
INDUSTRI BESAR							
– Unit Usaha (unit)	1.064	1.075	1.136	1.147	1,201	537	1.228
– Tenaga Kerja (orang)	357.970	361.549	368.693	373.294	381,123	254.116	382.632
– Nilai Investasi (Milyar Rp)	20.170	20.372	20.446	20.534	20,757	16.179	85.837
– Nilai Produksi (Milyar Rp	83.291	84.124	84.552	84.769	85,393	85.185	20.904
TOTAL INDUSTRI							
– Unit Usaha (unit)	803.454	807.478	811.273	813.140	673.011	816.804	818.928
– Tenaga Kerja (orang)	3.115.681	3.133.049	3.151.221	3.163.511	2.590.612	3.186.646	3.201.942
– Nilai Investasi (Milyar Rp)	66.836	67.271	67.702	67.993	56.551	68.572	218.415
– Nilai Produksi (Milyar Rp	211.159	212.632	214.057	215.149	216.139	217.285	68.990

Sumber: Disperindag Jatim, 2019

POTENSI INDUSTRI AGRO DI JAWA TIMUR

- Berdasarkan data BPS Jawa Timur, selama tahun 2019 industri agro Jawa Timur yang terdiri dari industri makanan-minuman, pengolahan tembakau, industri kayu dan produk kayu, industri kertas, dan industri furnitur, mengalami pertumbuhan produksi yang relatif bagus. Industri makanan dan minuman yang selama beberapa tahun terakhir selalu mendominasi PDRB industri pengolahan menunjukkan kinerja pertumbuhan produksi yang paling baik.
- Distribusi PDRB industri pengolahan di Jawa Timur tertuju pada 2 (dua) subsektor utama yaitu industri makanan dan minuman dan industri pengolahan tembakau dengan porsi masing-masing sebesar 25-30%, sedangkan sisanya terdistribusi ke subsektor lainnya seperti industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri kayu dan barang kayu, industri kertas dan barang dari kertas maupun industri lainnya. Hal ini menunjukkan peran serta industri agro, dimana didalamnya mencakup industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri kayu dan barang dari kayu serta industri kertas yang merupakan lingkup pembinaan industri agro, sangat dominan di PDRB industri di Jawa Timur.

- Produksi industri makanan skala kecil pada masing-masing triwulan tumbuh sebesar 12,35 persen sampai dengan 52,93 persen bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Industri makanan skala menengah dan besar juga mengalami pertumbuhan yang bagus, yaitu mencapai 17,04 persen pada triwulan III 2019.
- Seperti halnya industri makanan, industri minuman Jawa Timur selama tahun 2019 juga berkinerja bagus dengan mencatatkan pertumbuhan produksi sebesar 11,69 persen sampai 65,6 persen.
- Sementara itu pertumbuhan produksi industri kayu dan kertas selama tahun 2019 cenderung mengalami fluktuasi akibat ketersediaan bahan baku kayu yang semakin terbatas.
- Berdasarkan data, jumlah industri agro di Jawa Timur sebanyak 675 ribu unit usaha yang terdiri dari industri besar, menengah dan industri kecil. Sebanyak 2% merupakan industri besar dan menengah sedangkan sisanya merupakan industri kecil, sehingga pembinaan industri kecil sangat mutlak dilakukan, apalagi industri kecil sudah terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

POTENSI INDUSTRI NON AGRO DI JAWA TIMUR

- Pada tahun 2019,besaran PDRB sektor Industri Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai 711.303 (Tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tiga koma lima puluh milyar). Industri Non Agro terdiri 10 subsektor industri yaitu;1) industri tekstil dan pakaian jadi, 2) Industri kulit dan produk kulit, 3) industri kertas dan produk kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, 4) kimia, farmasi dan obat tradisional, 5) Barang galian bukan logam, 6) logam dasar, 7) Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, 8) industri angkuta, 9) Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL serta 10) Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
- Diolah dari data PDRB BPS Jawa, besaran PDRB sektor industri ini terdiri dari industri agro dan industri non agro. Dalam 3 tahun terakhir (2016 – 2019) cenderung mengalami peningkatan. Sehingga besaran PDRB tahun 2019

diperkirakan 206,278.02 (dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma kososng dua milayar rupiah) sekitar 29 % dari total besaran PDRB industri sektor. Adanya peningkatan besaran PDRB industri non agro ini didorong oleh meningkatnya produksi tekstil dan pakaian jadi serta percetakan untuk keperluan pemilu.

- Jumlah unit industri non agro pada tahun 2019, juga mengalami peningkatan dari 142.414 (seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat belas) unit tahun 2018 menjadi 142.957 (seratus emapt puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) unit tahun 2019, atau terjadi penambahan unit sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) unit. Sementara tenaga kerja mengalami peningkatan dari 587.210 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh) orang di tahun 2018 menjadi 591.230 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh) orang, atau ada penambahan tenaga kerja pada sub sektor industri non agro sebanyak 4.020 (empat ribu dua puluh orang).

Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Terhadap Total Ekspor Non Migas Jawa Timur

Tabel 3.11 : Ekspor Komoditi Utama Tahun 2019 *(Nilai: US$ Milyar)*

NO	KELOMPOK KOMODITI	NILAI Jan-Des 2018	NILAI Jan-Des 2019	PERTUM-BUHAN (%) *	PERAN (%) **
1.	Perhiasan /Permata	2.989.932,83	3.244.071,63	8,5	10,87
2.	Lemak,minyak hewan/ nabati	1.323.753,54	1.305.053,73	-1,41	10,14
3.	Kayu, Barang dari Kayu	1.466.224,28	1.331.369,18	-9,20	6,99
4.	Ikan dan Udang	1.185.239,90	1.116.013,72	-5,84	6,90
5.	Tembaga	1.120.724,89	1.140.058,22	1,73	6,88
6.	Kertas/Karton	919.618,75	926.473,18	0,75	4,60
7.	Berbagai Produk Kimia	784.987,24	696.312,11	-11,30	3,73
8.	Bahan Kimia Organik	901.639,28	958.279,91	6,28	3,69
9.	Daging dan Ikan Olahan	637.429,40	670.117,99	5,13	3,58
10.	Kendaraan dan bagiannya	468.184,49	539.753,69	15,29	3,48
	Total 10 Kelompok Komoditi	**11.797.733,60**	**11.927.503,38**	***1,10***	***60,85***
	Lainnya	**7.301.125,25**	**7.438.250,34**	***1,88***	***39,15***
	Total Ekspor Non Migas	**19.098.858,85**	**19.365.753,72**	***1,40***	***100,00***

Sumber : BRS, BPS Prov. Jatim
*Catatan : * Dibanding periode yg sama tahun 2018*
*** Terhadap ekspor nonmigas*

Peranan industri pengolahan sangat mendominasi kinerja ekspor non migas Jawa Timur dengan mencatatkan nilai ekspor selama tahun 2019 sebesar US$ 17,71 Milyar, memberikan kontribusi sebesar 91,43 persen dari total ekspor non migas Jawa Timur selama tahun 2019 yang nilainya mencapai US $ 19,37 Milyar.

Nilai ekspor non migas Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai nilai US $ 19,37 Milyar. milyar mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen atau sebesar US$ 0,23 milyar jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai nilai US $ 19,1 Milyar. Nilai ekspor industri pengolahan pada tahun 2019 mencapai nilai US$ 17,71 Milyar yang juga mengalami peningkatan sebesar 1,88 persen atau sebesar US$ 0,33 Milyar jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai nilai US$ 17,38 Milyar. Demikian juga jika dilihat dari kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Timur, pada tahun 2019 nilai ekspor produk industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 91,43 persen terhadap total ekspor non migas Jawa Timur, dimana kontribusi ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yang memberikan kontribusi sebesar 91,02 persen. Adapun komoditi industri pengolahan terdiri industri perhiasan/permata, lemak/ minyak hewan nabati, pengolahan kayu/ barang dari kayu, tembaga, ikan dan udang, industri bahan kimia organik, kertas dan karton, berbagai produk kimia, daging dan ikan olahan.

Berdasarkan data BPS, kinerja perdagangan internasional Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang menggembirakaan. Pada tahun 2019, ekspor non-migas Jawa Timur mencapai USD 19,37 Milyar sedangkan impor non-migas mencapai USD 18,93 Milyar sehingga terwujud neraca perdagangan sebesar surplus USD 435,45 Juta. Neraca perdagangan tersebut lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dimana terjadi defisit sebesar USD 1.602,83 Juta.

Ekspor non-migas Jatim thn 2019 turut ditopang oleh produk agro, seperti :

- Kayu dan barang dari kayu (USD 1.331,37 juta; *share* 6,87%)
- Lemak dan minyak hewan/nabati (USD 1.305,05 juta; *share* 6,74%)
- Ikan dan Udang (USD 1.305,05 juta; *share* 5,76%)
- Kertas/Karton (USD 926,47 juta; *share* 4,78%)
- Daging dan Ikan Olahan (USD 670,12 juta; *share* 3,46%), dsb

Kinerja Standarisasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Industri

Tabel 3.12 : Fasilitasi Standardisasi Produk IKM / Perusahaan Di Jatim Th 2014-2019

NO	FASILITASI	TAHUN						TOTAL
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BATIK MARK	14	25	40	40	10	22	**151**
2	HACCP	-	-	-	2	4	1	7
3	SERTIFIKAT HALAL	203	-	187	200	130	55	**775**
4	ISO 9001	34	95	104	64	42	4	**345**
5	BARCODE	23	32	15	21	10	6	**107**
6	SPPTSNI	4	9	3	23	9	6	**54**
7	UJI NUTRISI	-	537	181	185	110	77	**1.090**
8	UJI PRODUK	-	-	-	62	18	14	**94**
9	BIMBINGAN ISO 9001	17	80	60	27	15	2	**201**
10	BIMBINGAN UPGRADING ISO 9001	-	-	-	-	6	-	**6**
11	BIMBINGAN HACCP	-	-	-	-	-	3	**3**
12	BIMBINGAN GKM	12	10	-	-	5	-	**27**
13	BIMBINGAN SOP	-	35	25	25	7	-	**92**
	TOTAL	**307**	**823**	**615**	**649**	**366**	**192**	**2.952**

Sumber : UPT PMPI Surabaya & UPT PMPI Malang, Disperindag Jatim

Tabel 3.13: Fasilitasi Kekayaan Intelektual Produk IKM/Perusahaan Di Jatim Th 2014-2019

NO	FASILITASI	TAHUN						TOTAL
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	MEREK	940	815	735	776	631	926	4.823
2	CIPTA	25	30	30	30	13	5	133
3	DESAIN INDUSTRI	9	-	-	10	-	-	19
	TOTAL	**974**	**845**	**765**	**816**	**644**	**931**	**4.975**

Sumber : UPT PMPI Surabaya & UPT PMPI Malang, Disperindag Jatim

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 5 program Industri dan Standarisasi, yang dilaksanakan oleh 10 unit kerja, antara lain :

1. Bidang Industri Agro
2. Bidang Industri Non Agro
3. Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan
4. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo,
5. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya
6. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
7. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan
8. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya
9. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
10. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang

A. Adapun rincian programnya adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Industri Agro

Program ini dilaksanakan oleh bidang industri agro, dengan pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.549.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.256.733.307,00 atau 93,56 %. Dengan Indikator Program yaitu : PDRB industri agro dengan target Rp 325,644 Trilyun dan realisasi - Trilyun Rupiah. (- %).

Program ini didukung oleh 8 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan
2. Kegiatan Pemetaan industri hasil tembakau
3. Kegiatan Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret
4. Kegiatan Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat
5. Kegiatan Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
6. Kegiatan Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro
7. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

8. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

2) Program Pengembangan Industri Non Agro

Program ini dilaksanakan oleh bidang industri non agro dengan pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.724.442.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.623.041.353,00 atau 96,28 %. Dengan Indikator Program yaitu : PDRB industry non agro dengan target Rp 209,822 Trilyun dan realisasi - Trilyun Rupiah. (- %)

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi
2. Kegiatan Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro
3. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
4. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Elektronika dan Telematika

3) Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan

Program ini dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.725.781.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.243.796,00 atau 95,39 %. Dengan Indikator Program yaitu : Jumlah Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan target 16 draft rancangan kebijakan dan realisasi 16 draft rancangan kebijakan (100 %) dapat memenuhi target.

Program ini didukung oleh 5 (Lima) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penataan Struktur Industri
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri
3. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan
4. Kegiatan Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan
5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan

4) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

Program ini dilaksanakan oleh 5 (lima) UPT Industri, antara lain :

1. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo,
2. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya
3. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
4. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan
5. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya

Pagu anggaran program peningkatan kapasitas teknologi industri pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.897.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.987.818,254,- atau 93,82%. Dengan Indikator Program yaitu : Jumlah Jasa pelayanan teknis dengan target 1.572 pelayanan dan realisasi 6.066 pelayanan (385,88 %), dapat melebihi target.

Program ini didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan
3. Kegiatan Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan
4. Kegiatan Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu
6. Kegiatan Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu
7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit
8. Kegiatan Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit
9. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan
10. Kegiatan Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan
11. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan
12. Kegiatan Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan
13. Kegiatan Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan
14. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu

15. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit
16. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan

5) Program Peningkatan Standarisasi Industri

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT PMPI, antara lain :

1. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
2. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang

Pagu Anggaran program peningkatan standarisasi industri pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.341.417.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.137.966.106,00 atau 96,19 %. Dengan Indikator Program yaitu : prosentase IKM yang telah menerapkan standardisasi dan HKI dengan target 8,25 persen dan realisasi 6,30 persen (76,36 %), tidak dapat memenuhi target.

Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang
3. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
4. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
5. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang
6. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang

B. PERMASALAHAN / KENDALA :

1) Produktifitas dan daya saing industri yang masih rendah, khususnya industri skala kecil;
2) Sektor industri yang kuat di hilirnya, belum didukung oleh industri dasar yang memadahi yang berdapak pada ketergantungan bahan baku impor;
3) Daya saing produk ekspor yang masih stagnan;
4) Masih banyaknya IKM yang belum memiliki legalitas secara lengkap terkait perdagangan dan perindustrian;
5) Kurangnya pemahaman dan budaya mutu dalam penerapan standardisasi industri, khususnya industri skala kecil dan menengah;
6) Tingginya biaya survaillance SNI Sistem Mutu (ISO/HACCP/OHSAS dll) atau SNI Produk, Uji Produk dan Re-Sertifikasi;
7) Beberapa komoditi SNI wajib, mempersyaratkan memiliki laboratorium internal sehingga seluruh alat ukur yang digunakan wajib dikalibrasi dan dibuktikan dengan menggunakan sertifikat kalibrasi;
8) Ketidakpastian kebijakan, mekanisme dan tarif sertifikat halal setelah pelimpahan kewenangan LPPOM MUI pada BPJPH per tanggal 17 Oktober 2019;
9) Kurang lengkapnya ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di Jawa Timur sehingga sertifikasi harus dilakukan diluar Jawa Timur;
10) Terbatasnya LS-Pro yang menawarkan bantuan pengurusan Nomor Registrasi Produk (NRP) secara gratis.
11) Rendahnya pemahaman IKM tentang kelas barang pada pendaftaran kekayaan Intelektual (merek) sehingga banyak IKM yang mendaftarkan merek hanya 1 komoditi pada 1 kelas barang;
12) Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi kekayaan Intelektual terkait penyelesaian keberatan atas merek yang telah didaftarkan dan SDM untuk drafting paten.
13) Ketergantungan pada barang impor khususnya sebagai bahan baku, bahan penolong maupun barang modal. Data BPS tahun 2019, sebanyak 81% bahan baku dan penolong industri berasal dari impor, antara lain Kedelai (bubuk/biji), gandum, kalium klorida (bahan pupuk), tembakau virginia, susu bubuk, biji kopi robusta, besi baja, cengkeh.

14) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kawasan industri
15) Kurangnya ketersediaan utilitas industri seperti listrik, air, gas, dan pengolahan limbah
16) Kurangnya tenaga terampil dan setingkat supervisor
17) Tekanan produk impor sangat tinggi utamanya produk dari China, sehingga industri dalam negeri harus terus meningkatkan daya saing, terutama daya saing harga produk.
18) Industri Kecil Menengah (IKM) masih mengalamai kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dna bahan penolong, mesin peralatan, hingga pemasaran yang masih terbatas.
19) Tantangan revolusi industri 4.0
20) Bahan baku
    - Keterputusan rantai pasokan bahan baku lokal dengan industri pengolahan.
    - Bahan baku lokal belum memenuhi standar yang dibutuhkan dunia industri.
    - Ketergantungan import dan keterlambatan stock
    - Keterbatasan bahan baku kayu untuk industri kapal
    - Laminasi bambu sulit digunakan untuk industri kapal
21) Mesin, Teknologi dan SDM
    - Terbatasnya mesin/peralatan dan infrastruktur pendukung proses produksi
    - Fasilitas produksi galangan kapal yang relatif berusia tua
    - Adopsi teknologi rendah
    - Terbatasnya kualitas SDM industri
    - Biaya produksi tinggi yang berakibat pada rendahnya daya saing
22) Pasar
    - After market belum bisa masuk ke Pabrikan Industri Otomotif (Jakarta dan Jawa Barat)
    - Beberapa IKM belum memenuhi standart SNI untuk produk wajib SNI
    - Persaingan dengan produk impor terutama dari aspek harga produk
23) Finansial

    Terbatasnya sumber pembiayaan dengan bunga rendah

24) Kebijakan

- Kebijakan clean and clear port yang berdampak pada tingginya harga sewa lahan pelabuhan
- Penerapan SKKNI pada beberapa produk, yang belum mampu dilaksanakan oleh perusahaan

C. FASILITASI/LANGKAH LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN:

- Program/kegiatan untuk pembinaan IKM makanan-minuman antara lain: (1) pelatihan teknis produksi, (2) pendampingan IKM, (3) layanan teknologi proses dan kemasan produk, (4) uji nutrisi produk IKM makanan-minuman, (5) fasilitasi standarisasi proses (ISO, HACCP, GMP) dan produk (SNI), (6) fasilitasi halal, (7) fasilitasi pemasaran, (8) fasilitasi pembiayaan.
- ***Pelatihan teknis produksi*** difokuskan pada pengolahan hasil pertanian agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar (hilirisasi agro maritim) serta memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Beberapa hasil pertanian, peternakan, dan perikanan selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah, tanpa diolah, yang bernilai tambah rendah. Beberapa komoditi yang dikembangkan antara lain kopi sangrai (semula dijual bijian), kakao (diolah menjadi produk antara seperti bubuk, pasta, lemak), dan tepung non-gandum.
- ***Pendampingan IKM.*** Melakukan pendampingan pada IKM skala usaha kecil dan menengah dalam bidang penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ISO, SNI, cara membuat SOP pengolahan produk, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.
- ***Layanan teknologi proses*** dan kemasan makanan-minuman diberikan melalui UPT Industri Makanan-Minuman & Kemasan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk makanan & minuman terutama kemasannya. Sebagaimana diketahui kemasan produk makanan-minuman yang dihasilkan oleh IKM rata-rata memiliki kemasan yang kurang menarik.
- ***Fasilitasi uji nutrisi*** juga diberikan oleh Dinas Perindag Jatim kepada IKM makanan-minuman. Hal ini dilakukan agar produk IKM agro Jawa Timur mampu menembus pasar-pasar modern.

- ***Fasilitasi sertifikasi Halal.*** Untuk mengantisipasi pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada tahun 2019 sebagaimana dimanatkan oleh UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- ***Fasilitasi Pemasaran.*** Fasilitasi pemasaran dilakukan melalui pameran berskala nasional dan internasional dan misi dagang. Promosi juga dilakukan melalui kantor perwakilan dagang Jawa Timur yang tersebar di 26 provinsi mitra. Menghadapi era industri 4.0, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong IKM untuk memanfaatkan digital market place untuk mempromosikan produknya.
- Kerjasama dengan Kantor Layanan Teknis (KLT) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait fasilitasi dalam rangka penerapan standar pada IKM dengan cara memberikan bantuan secara silang pada IKM bila Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan bimbingan maka KLT memberikan bantuan sertifikasi atau sebaliknya;
- Kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Surabaya untuk melakukan pengecekan ulang merek yang telah dinyatakan dapat didaftarkan dan pengecekan kelegkapan administrasinya.
- Kerjasama pada LSPro yang memberikan subsidi biaya sertifikasi pada IKM.
- Pelatihan/ bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM maupun perkembangan produk IKM di Jawa Timur dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja industri agro di Jawa Timur
- Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha di Kawasan Agropolitan
- Fasilitasi pemberian sertifikat/ kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret
- Program pengentasan kemiskinan dalam Anti Poverty Program (APP) Jawa Timur
- Fasilitasi partisipasi industri pada event-event pameran dalam rangka promosi produk
- Forum komunikasi perkembangan indistri agro di Jawa Timur
- Pengembangan sistem informasi untuk mendukung percepatan akses data dan informasi industri agro dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pengembangan industri agro di Jawa Timur
- Bahan baku
    - Mengadakan rapat dengan para pelaku usaha batik dan perusahaan supplier batik untuk mengurangi import bahan baku dan memotong jalur distribusi bahan baku.

- Mengadakan beberapa pertemuan dengan industri garam dan industri kesehatan pengguna garam untuk meningkatkan penggunaan garam local sebagai bahan baku industry

- Mesin, Teknologi dan SDM
  - Mempromosikan pemanfaatan program restrukturisasi mesin yaitu program Kementerian Perindustrian untuk memberikan bantuan pembelian alat / mesin sebesar 25% - 30%.
  - Memberikan peralatan habis pakai dalam pelatihan
  - Melaksanakan workshop dan rapat – rapat dengan industri dan SMK dalam pelaksanaan program vokasi link and match antara industri dan SMK untuk menyediakan SDM SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
  - Rapat dengan pelaku usaha industri otomotif untuk pengembangan kendaraan motir listrik di Jawa Timur
- Pasar
  - Rapat untuk pengembangan industri transportasi udara dengan Citi Link
  - Rapat untuk kerjasama dengan BliBli.Com
  - Melaksanakan pameran untuk komoditi perhiasan, batik, bordir, dan asesoris serta kendaraan bermotor.
  - Festival animasi dan otomotif sebagai event untuk mepromosikan animasi dan otomotif Jawa Timur
- Finansial
  - Mensosialisasikan dagulir Bank UMKM bagi IKM
- Kebijakan
  - Mengadakan koordinasi dengan Kadin untuk dapat menginformasikan SKKNI pada perusahaan dan mengusulkan produk yang yang perlu memiliki SKKNI.

D. SOLUSI :

1) Kolaborasi dan kerjasama antara industri skala besar dengan IKM perlu ditingkatkan sehingga bisa mempercepat proses tranfer teknologi
2) Peningkatakn Program link and match antara dunia pendidikan, lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja dengan dunia industri skala besar, menengah dan kecil.
3) Peningkatan kualitas bahan baku terutama bahan baku yang tersedian di dalam negeri (kualitas,kuantitas, dan kontinuitas)
4) Pengembangan standarisasi industri
5) Peningkatan kapasitas teknologi bagi IKM melalui pelayanan UPT industri.
6) Penciptaan kelembagaan skema keterkaitan (linkage) hulu-hilir industri di Jawa Timur, yaitu hilirisasi industri yang melibatkan semua stakeholder yang ada
7) Membuat buku pedoman fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual yang berisi informasi tentang alur proses pelayanan, persyaratan minimum legalitas yang harus dimiliki IKM dengan harapan IKM dapat mempersiapkan legalitas sebelum mengajukan fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual; Diseminasi atau sosialisasi pada event pelayanan publik;
8) Melakukan verifikasi secara komprehensif kepada IKM yang mengajukan permohonan fasilitasi standardisasi dengan menggunakan tenaga verifikasi yang kompeten, Adapun beberapa yang menjadi penilaian,antara lain :
   a. Legalitas usaha;
   b. Komitmen untuk melanjutkan dan merawat sertifikasi sistem manajemen dan atau standar produk dengan membayar biaya survaillance;
   c. Sarana dan prasarana pabrik;
   d. Termasuk daftar SNI Wajib atau Sukarela.

9) Kerjasama dengan LSPro/LSSM dan Laboratorium Uji untuk memberikan subsidi pembiayaan; Fasilitasi bantuan uji produk; Bekerjasama dengan BSN melalui Kantor Pelayanan Teknis Surabaya untuk memberikan bantuan pembiayaan;
10) Menginformasikan pada IKM pada saat konsultasi, diseminasi atau sosialisasi dengan menjelaskan daftar peralatan laboratorium yang harus dimiliki sesuai peraturan teknis kementerian terkait; Mengusulkan pembuatan proposal

bantuan alat laboratorium pada Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

11) Koordinasi secara intens pada Kanwil Kemementerian Agama Provinsi Jawa Timur; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pusat; LPPOM MUI Pusat dan Provinsi Jawa Timur sehingga memperoleh informasi, kepastian perpanjangan serta pendaftaran baru sertifikasi halal dan sertifikasi penyelia halal;
12) Menginformasikan kepada IKM, LSPro yang memiliki ruang lingkup sesuai komoditi yang akan disertifikasi dengan lokasi terdekat dan jangkauan moda transportasi termudah untuk menekan biaya trasportasi lead auditor, auditor dan PPC sehingga mengurangi biaya sertifikasi dan mengurangi biaya pengiriman contoh uji;
13) Bekerjasama dengan LS Pro yang memberikan bantuan pengurusan NRP include dengan sertifikasi.
14) Transformasi Sistem Agrobisnis → keterkaitan subsistem antara hulu – hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk agro sesuai permintaan pasar
15) Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis → sistem informasi hulu – hilir (sarana – pra sarana, produksi, distribusi & pasar)
16) Peningkatan Infrastruktur (Irigasi, Jalan, Pelabuhan, Listrik, Kawasan Industri, Pasar Tradisional)
17) Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku untuk industri agro
18) Peningkatan standardisasi / sertifikasi produk barang dan jasa
19) Pengembangan penelitian & pengembangan Agrobisnis → pemanfaatan / penguasaan teknologi (bioteknologi, eco-farming) & penciptaan inovasi baru
20) Pembinaan SDM Agrobisnis → produktivitas tenaga kerja
21) Penguatan struktur industri → pengembangan agroindustri berbasis IKM melalui kemitraan dengan usaha-usaha leading sektor
22) Optimalisasi perdagangan →peningkatan tata niaga & penguatan akses pasar
23) Optimalisasi peran lembaga keuangan & perbankan → penyediaan pemodalan
24) Percepatan Investasi → peningkatan iklim investasi, menekan high cost economy & penyederhanaan perijinan

E. REKOMENDASI / RENCANA TINDAK LANJUT :

1) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri, produktifitas, daya saing produk, efisiensi, kualitas dan jaringan pemasaran industri di Jawa Timur, Disperindag telah melakukan strategi pembinaan IKM secara Paripurna yaitu pembinaan secara menyeluruh mulai dari sisi produksi sampai dengan barang jadi dan pemasarannya. Dari sisi Produksi pembinaan dilakukan oleh bidang Industri, UPT Industri antara lain dengan peningkatan kualitas SDM IKM melalui berbagai pembinaan pelatihan, mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru, penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global, peningkatan skala IKM, penjaminan pembiayaan usaha yang kompetitif, pengembangan kemitraan dengan industri menengah dan besar. Kemudian setelah produk jadi pembinaan bergeser kepada UPT PMPI antara lain dengan melakukan berbagai fasilitasi standardisasi dan Kekayaan Intelektual, antara lain SNI, Merk, Barcode, uji nutrisi, uji produk, fasilitasi desain produk dan kemasan, kemudian setelah produk jadi siap dan layak dipasarkan pembinaan bergeser ke bidang perdagangan dan UPT Perdagangan antara lain dengan pelatihan pemasaran baik ekspor maupun lokal, pelatihan tata niaga ekspor, peningkatan pemasaran dengan tekhnologi informasi (marketing online), fasilitasi uji pasar, fasilitasi pameran, optimalisasi misi dagang, monitoring realisasi tindaklanjut misi dagang, temu bisnis melalui optimalisasi pemanfaatan KPD Jawa Timur yang ada di 26 provinsi mitra.
2) Vokasi Industri, untuk pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan dunia industri. Dalam konteks vokasi industri, perlu diperkuat peningkatan kualitas guru di lembaga-lembaga pendidikan vokasi.
3) Sosialisasi dan Pengembangan communal branding pada komunitas-komunitas yang memiliki produk-produk khas dan berdaya saing ekspor.
4) Mendorong implementasi Millenial Job Center kolaborasi dengan dunia industri dan lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi.
5) Mendorong OPOP (One Pesantren One Product) dengan membangun basis data produk-produk pesantren dan mengakselerasi pelatihan serta pendampingan OPOP.

6) Pemanfaatan aplikasi GIIS (Geographycal Industry Information System) untuk pemetaan kosentrasi industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang logistik.
7) Bekerjasama dengan BUMN dan industri besar terkait pembiayaan fasilitasi standardisasi dan Kekayaan Intektual melalui anggaran program CSR;
8) Bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten / Kota yang awareness dalam penerapan standardisasi;
9) Bekerjasama dengan Mastan (Masyarakat Standardisasi) untuk melaksanakan seminar "Standardisasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk IKM Jawa Timur ke Pasar Global dengan Sharing Pembiayaan".
10) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan industri dalam rangka pemenuhan utilitas secara bersama-sama, seperti pengolahan limbah, listrik, dll.
11) Peningkatan kemampuan SDM industri, baik melalui pelatihan maupun job training.
12) Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN) senantiasa disosialisasikan sehingga produk Jawa Timur dikonsumsi oleh orang Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.
13) Pembinaan IKM paripurna, mulai dari dukungan penyediaan bahan baku, peningkatan SDM pelaku usaha, standardisasi produk, promosi produk dan bantuan permodalan.
14) Pengembangan jaringan/ kerjasama antara IKM dan industri besar dan menengah, baik dari segi pemenuhan bahan baku maupun pemasaran produk
15) Survei Pasar,
    - Mengetahui lebih detil pelaku dan kebutuhan Jenis Produk aplikasi dari dunia industri
    - Mengetahui tren teknologi informasi dan komunikasi
16) Business Matching
    - Menjajaki kebutuhan aplikasi perusahaan mature player yang representatif dan bersedia bekerjasama
    - Melakukan kerjasama bisnis antara startup dng calon klien
17) Transfer Teknologi dan Sertifikasi

- Transfer teknologi sesuai kebutuhan pasar, industri dan tren teknologi informasi dan komunikasi
- Proses Sertifikasi baik bagi personil maupun perusahaan

18) Coaching Kewirausahaan
    - Memberikan arahan dan stepp pengembangan start-up
    - Transfer pengetahuan dari para Coach/pengusaha senior
    - Memudahkan para start-up untuk menjadi pengusaha

F. PENJELASAN PERMASALAHAN, TANTANGAN, STRATEGI KE DEPAN

- ***Ketergantungan pada bahan baku impor.*** Impor bahan baku dan penolong Jawa Timur selama tahun 2019 mencapai **80,24 persen** dari total nilai impor. Untuk itu, upaya-upaya subtitusi bahan baku impor harus terus ditingkatkan, termasuk pada industri agro. Penggunaan bahan baku lokal harus terus kita upayakan secara bertahap untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada bahan baku impor. Tahap awal subtitusi bahan baku lokal adalah dengan membangun basis data bahan baku lokal yang tersedia per jenis industri, membangun sistem delivery, standar pembelian minimal bahan baku dan mekanisme pembayaran. Langkah mengurngi ketergantungan bahan baku impor ini secara paralel komunikasikan dan disinergikan dengan para pelaku industri di Jawa Timur.

- ***Industri Jawa Timur didominasi oleh usaha industri berskala kecil dan menengah (IKM).*** Lebih dari 95% industri di Jawa Timur merupakan IKM. Sebagian besar IKM memerlukan peningkatan kualitas produk dan SDM, penerapan standardisasi, akses permodalan, dan akses pemasaran lebih luas. Tentu saja ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan keberpihakan dan kerja-kerja cerdas. Para pelaku IKM perlu melakukan spesialisasi rantai pasokan dengan bekerjasama sama dengan industri skala besar dengan menerapkan model cluster.

- Tantangan lain adalah ***begitu massif dan cepatnya perkembangan ekonomi digital***. Saat ini kita memasuki era digital yang menuntut otomatisasi, digitalisasi, dan konektifitas di berbagai sektor usaha, terlebih di sektor usaha industri dan perdagangan. Ekonomi digital ini harus kita arahkan secara tepat agar mendorong

penguatan industri berbahan baku lokal. Industri 4.0 (four point zero) dengan demikian tidak semata-mata dimaknai sebagai digitalisasi dan efisiensi proses produksi, tetapi juga optimalisasi penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung subtitusi impor. Data-data bahan baku lokal per jenis industri digitalisasi, baik memanfaatkan marketplace, membangun toko digital tersediri ataupun bergabung dalam bentuk agregator sehingga proses pembelian bahan baku lokal bisa lebih efisien.

- Selain tantangan di atas, industri makanan dan minuman, yang merupakan komponen utama industri agro, menghadapi beberapa tantangan khas tersendiri. Pertama, sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mulai tahun 2019 ini seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertfikat halal. Kedua, sebagian besar produk minuman merupakan produk yang wajib memiliki ijin edar BPOM. Kedua isu ini menjadi tantangan mengingat masih banyak IKM makanan dan minuman Jawa Timur yang perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memenuhi ketentuan tersebut. Agar sesuai target maka pencapaian sertifikasi halal dan ijin edar BPOM perlu sosialisasi massif dan pendampingan secara aktif ke desa desa dan pesantren.
- Pengembangan **kawasan industri.** Salah satu upaya untuk menumbuhkan industri agro adalah dengan mengembangkan Kawasan Industri yang saat ini telah terbangun 10 kawasan dengan total luas mencapai 4.430 hektare, yaitu: Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kawasan Industri Gresik (KIG), Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB), Ngoro Industrial Park (NIP), Maspion Industrial Estate (MIE), Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), Kawasan Industri Tuban (KIT), Safe N Lock, dan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE). Selain itu akan dikembangkan kawasan-kawasan baru. Pengembangan kawasan industri di wilayah-wilayah baru ini diharapkan mampu ***menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru*** dan ***mendorong pemerataan ekonomi***.

3.2.2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri.

Untuk dapat mewujudkan penguatan pangsa pasar ekspor luar negeri dan pengendalian impor serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua, serta analisa dari Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 : SASARAN STRATEGIS 2
Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**7**	**-**	**1114,29**	**165,88**	**-77,75**	**-414,3**	**127,11**	**1.815,86**	**Sangat Baik**

Tabel 3.15 : Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**7**	**127,11**	**1.815,86**

Tabel 3.16 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**7**	**-414,3**	**127,11**

Tabel 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**7**	**127,11**	**1.815,86**

Tabel 3.18 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th. 2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**127,11**	**53,87**	- Berdasarkan data BPS, Nilai Net Ekspor Non Migas Nasional periode Januari - Desember Tahun 2019 mencapai US$ 6,15 Milyar, mengalami pertumbuhan sebesar 53,87 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yang mencapai US$ 4 Milyar. - Berdasarkan data BPS, Nilai Net Ekspor Non Migas Jawa Timur periode Januari - Desember Tahun 2019 mencapai US$ 0,43 Milyar, mengalami pertumbuhan sebesar 127,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yang mencapai US$ - 1,61 Milyar.

Tabel 3.19 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**4.217.478.000**	**5,4**

Tabel 3.20 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1. Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**7**	**127,11**	**1.815,86**	**4.217.478.000**	**4.068.540.687**	**96,47**

Tabel 3.21 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
2.	Meningkatnya Net ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri	1. Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas	**1.815,86**	**96,47**	**1.719,39**

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran dua adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas

Target Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas tahun 2019 ditetapkan sebesar 7 persen, realisasi kinerja pada tahun 2019 diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 127,11 persen, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 1.815,86 persen.

Tabel 3.22 : Neraca Perdagangan Luar Negeri Non Migas Jatim thn 2018–2019 ***(US$ Ribu)***

Uraian	Tahun	
	2018	2019
Ekspor Non Migas	19.098.858,85	19.365.753,72
Impor Non Migas	20.705.299,16	18.930.305,14
Net Eksim Non Migas	- 1.606.440,31	435.448,58

Sumber : BPS Jatim (exim non migas Jatim Jan - Des Tahun 2018 - 2019)

Berdasarkan data BPS, Nilai Net ekspor non migas Jawa Timur periode Januari - Desember tahun 2019 sebesar US$ 0,43 Milyar mengalami pertumbuhan sebesar 127,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2018 dimana nilai net ekspor non migas Jawa Timur periode Januari - Desember tahun 2018 sebesar US$ -1,61 Milyar.

Nilai ekspor Jawa Timur Desember 2019 mencapai USD 1,72 miliar atau naik sebesar 1,23 persen dibandingkan November. Nilai tersebut dibandingkan Desember 2018 naik sebesar 12,64 persen.

Ekspor nonmigas Desember 2019 mencapai USD 1,65 miliar atau naik sebesar 4,97 persen dibandingkan November. Nilai tersebut dibandingkan Desember 2018 naik sebesar 11,30 persen.

Ekspor migas Desember 2019 mencapai USD 64,95 juta atau turun sebesar 46,91 persen dibandingkan November. Nilai tersebut naik sebesar 62,34 persen jika dibandingkan Desember 2018.

Golongan barang utama ekspor nonmigas Desember 2019 adalah Perhiasan/Permata sebesar USD 179,85 juta, disusul oleh Lemak dan Minyak Hewan/Nabati sebesar USD 167,70 juta serta Kayu dan Barang dari Kayu sebesar USD 115,72 juta.

Secara kumulatif, selama Januari-Desember 2019, ekspor yang keluar Jawa Timur sebesar USD 20,28 miliar atau turun 0,49 persen dibandingkan Januari-Desember 2018, sebesar USD 20,38 miliar.

Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar pada Januari-Desember 2019 adalah Jepang mencapai USD 2.959,13 juta (dengan peranan 15,28 persen) disusul berikutnya ekspor ke Amerika Serikat sebesar USD 2.634,43 juta atau dengan peranan 13,60 persen, dan ke Tiongkok USD 2.299,36 juta dengan peranan 11,87 persen. Ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN mencapai USD 3.654,17 juta atau dengan kontribusi sebesar 18,87 persen, sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa USD 1.614,49 juta (8,34 persen).

Nilai Impor Jawa Timur pada bulan Desember 2019 mencapai USD 2,05 miliar atau turun sebesar 5,05 persen dibandingkan November. Angka ini mengalami penurunan 5,22 persen dibandingkan Desember 2018.

Impor nonmigas Desember 2019 mencapai USD 1,59 miliar atau turun 8,60 persen dibandingkan November. Nilai impor nonmigas tersebut turun sebesar 10,46 persen dibanding Desember 2018.

Impor migas Desember 2019 sebesar USD 454,86 juta atau naik sebesar 9,86 persen dibanding November. Dibandingkan Desember 2018, nilai tersebut naik sebesar 19,24 persen.

Golongan barang utama impor nonmigas bulan Desember 2019 adalah golongan Buah-buahan (HS 08) sebesar USD 166,55 juta, berikutnya golongan

barang Mesin-mesin Pesawat Mekanik (HS 84) senilai USD 165,17 juta dan golongan Besi dan Baja (HS 08) sebesar USD 145,95 Juta.

Secara kumulatif, selama Januari-Desember 2019, impor yang masuk ke Jawa Timur sebesar USD 23,34 miliar atau turun sebesar 9,32 persen dibandingkan Januari- Desember 2018, sebesar USD 25,73 miliar

Negara asal barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2019 dari Tiongkok USD 5.872,78 juta (31,02 persen), disusul dari Amerika Serikat sebesar USD 1.306,46 juta (6,90 persen) dan impor dari Thailand sebesar USD 983,08 juta (5,19 persen). Impor nonmigas dari kelompok negara ASEAN sebesar USD 2.907,68 juta (15,36 persen), sementara impor nonmigas dari Uni Eropa mencapai USD 1.606,87 juta (8,49 persen).

Nilai Net Ekspor Non Migas (Milliar US$)

Target Indikator Kinerja Nilai Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri tahun 2019 ditetapkan surplus sebesar US$ 6,44 milliar, realisasi kinerja pada tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan yaitu surplus sebesar US$ 0,44 milliar, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 6,83 persen.

Pada tahun 2019 ekspor non migas Jawa Timur mengalami kenaikan dan impor mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Ekspor non migas mencatatkan nilai US$ 19,37 milyar naik sebesar US$ 0,25 milyar, sedangkan impor non migasnya sebesar US$ 18,93 milyar turun sebesar US$ 1,69 milyar, dan net ekspor-impor non migas tahun 2019 mengalami surplus sebesar US$ 0,44 milyar, masih dibawah target sebesar US$ 6,4 milyar.

Meskipun penurunan impor dan kenaikan ekspor non migas belum mampu membuka dan memperlebar neraca perdagangan luar negeri Jawa Timur sesuai target sebesar US$ 6,4 milyar. Namun upaya untuk mengendalikan impor menunjukkan hasil yang cukup baik serta dengan didukung pengelolaan impor dalam rangka mendukung kegiatan ekspor.

Tabel 3.23 : Neraca Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur Th. 2018-2019

URAIAN	Januari-Desember		Pertumbuhan
	2018	2019	
	NILAI (ribu US$)	NILAI (ribu US$)	%
TOTAL EKSPOR	**20.383.709,07**	**20.284.491,41**	**-0,49**
Ekspor Non Migas	19.098.858,85	19.365.753,72	1,40
Industri	17.381.888,27	17.708.559,28	1,88
Pertanian	1.643.361,80	1.587.712,74	-3,39
Pertambangan & Lainnya	73.608,77	69.481,69	-5,61
TOTAL IMPOR	**25.732.697,64**	**23.335.474,51**	**-9,32**
IMPOR NON MIGAS	20.705.299,16	18.930.305,14	-8,57
Bahan baku/penolong	20.842.886,65	18.724.664,19	-10,16
Barang Modal	2.113.021,67	2.026.935,58	-4,07
Barang Konsumsi	2.776.789,32	2.583.874,75	-6,95
TOTAL NERACA	-5.348.988,57	-3.050.983,10	-42,25
NON MIGAS	-1.606.440,31	435.448,58	127,11

Sumber : BPS, diolah Disperindag Prov Jatim, Bidang Perdagangan Internasional

Kondisi tahun 2019 secara umum masih cukup baik dengan berhasilnya mencatatkan nilai nett yang positif (+), mengingat beberapa kondisi yang berpengaruh pada kinerja perdagangan internasional belum sepenuhnya pulih, antara lain secara internal masih belum optimalnya pertumbuhan industri, kurangnya fasilitas baik insfrastruktur maupun pembiayaan serta faktor eksternal, dimana kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih sehingga daya beli masyarakat dunia masih rendah.

Ekspor non migas terdiri dari ekspor hasil industri, hasil pertanian serta hasil pertambangan dan lainnya. Dari ketiga sektor tersebut yang selalu memegang peranan paling dominan terhadap ekspor nonmigas adalah sektor industri. Pada periode Januari – Desember 2019 peran sektor industri menyumbang 91%. Impor non migas yang masuk ke wilayah Jawa Timur didominasi oleh impor bahan baku/penolong, pada Periode Januari - Desember tahun 2019 *share*-nya mencapai 98,91%.

Tabel 3.24 : Daftar Negara Asal Impor Non Migas

No	NEGARA TUJUAN EKSPOR	NILAI Jan–Des 2018	NILAI Jan–Des 2019	KET
1.	Jepang	2.895.509,74	794.730,12	(4)
2.	Amerika Serikat	2.337.898.24	1.306.462,33	(2)
3.	Tiongkok	1.743,902,06	5.872.778,36	(1)
4.	Malaysia	1.194.244,93	697.841,32	(5)
5.	Singapura	1.151.321,67	677.532,25	(6)
6.	Swiss	900.593,49	108.905,63	(10)
7.	India	585.587,87	538.133,63	(8)
8.	Thailand	553.884,17	983.078,85	(3)
9.	Korea Selatan	479.840,75	637.066,09	(7)
10	Belanda	411.559,51	195.561,16	(9)
Total 10 Negara Tujuan		*12.254.342,43*	*11.812.089,74*	

Sumber : BRS, BPS Prov.Jtm

Jika dilihat menurut negara tujuan utama ekspor nonmigas, Tiongkok adalah negara tujuan utama ekspor Jawa Timur tahun 2019, disusul ke Jepang dan Amerika Serikat. Selama bulan ini, ekspor nonmigas Jawa Timur ke Tiongkok mencapai USD 267,93 juta, sedangkan ekspor ke Jepang, dan Amerika Serikat berturut-turut sebesar USD 239,51 juta dan USD 232,17 juta.

Kawasan negara ASEAN masih menjadi tujuan utama ekspor nonmigas Jawa Timur selama 2019, dengan peranan sebesar 17,15 persen. Malaysia menjadi negara utama dengan peranan 5,40 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Timur, diikuti Vietnam dengan peranan sebesar 5,22 persen. Ekspor nonmigas bulan ini ke kawasan ASEAN sebesar USD 283,82 juta. Sementara itu ekspor nonmigas ke kelompok negara Uni Eropa menyumbang 8,52 persen atau dengan nilai USD 141,00 juta. Ekspor ke kawasan ini, dominan ke Belanda sebesar USD 47,18 juta dan diikuti ekspor ke Jerman sebesar USD 26,55 juta.

Secara kumulatif selama Januari-Desember 2019, ekspor nonmigas ke kawasan negara ASEAN sebesar USD 3.654,17 juta atau dengan peranan 18,87 persen. Singapura menjadi tujuan utama dengan nilai ekspor nonmigas mencapai USD 1.149,14 juta (dengan peranan sebesar 5,93 persen). Ekspor nonmigas ke Uni Eropa pada periode tersebut mencapai USD 1.614,49 juta dengan kontribusi sebesar 8,34 persen. Ekspor ke Belanda merupakan yang terbesar dari kawasan Uni Eropa selama Januari-Desember 2019 senilai USD 436,96 juta, atau dengan peranan sebesar 2,26

persen. Ekspor nonmigas ke negara utama lainnya selama periode ini, yang terbesar adalah ke Jepang dengan nilai USD 2.959,13 juta atau dengan kontribusi sebesar 15,28 persen, disusul ke Amerika Serikat sebesar USD 2.634,43 juta atau dengan peranan sebesar 13,60 persen dan ke Tiongkok sebesar USD 2.299,36 juta atau dengan peranan sebesar 11,87 persen.

Dalam rangka peningkatan ekspor dan pengendalian impor, strategi yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka perlindungan konsumen, yaitu pengawasan terhadap aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta pengawasan terhadap perlindungan HKI, perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi Nasional, pengawasan atas kewajiban SNI & label-manual-garansi.
- Meningkatkan sosialisasi skema, prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
- Mendorong investasi pembangunan industry intermediate yang memproduksi bahan baku industry guna menekan impor bahan baku dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
- Adanya deregulasi kebijakan perdagangan yang menggerakkan kembali sector riil dan meningkatkan daya saing industry nasional untuk menghadapi dinamika.
- Melakukan koordinasi dengan provinsi lain dalam rangka pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Jawa Timur sebagai alternatif pengganti barang-barang impor (substitusi impor).
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADINDA Jawa Timur untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diekspor, seperti tepung ikan, tepung jagung dan lainnya. Kegiatan ini perlu disertasi dengan fokumen studi kelayakan yang bisa menyakinkan para calon investor yang akan diundang investasi ke Provinsi Jawa Timur.

- Optimalisasi Pemanfaatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Provinsi lain sebagai mediator bagi pengusaha di Jawa Timur dan pengusaha di provinsi lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
- Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing sehingga perkembangan industri di level hilir dibarengi dengan perkembangan industri hulu.
- Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor di Jawa Timur. Ketersedian informasi dan kebijakan impor dihubungkan dengan sistem informasi perdagangan yang sudah dibangun untuk memastikan bahwa barang-barang yang diimpor tersebut belum diproduksi para pengusaha nasional.

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Target yang ditetapkan untuk pertumbuhan ekspor non migas tahun 2019 adalah sebesar 7%, realisasinya sebesar 1,4%, dengan tingkat capaian 20,00%, sehingga target pertumbuhan ekspor non migas tidak tercapai.

Indikator persentase pertumbuhan ekspor non migas Jawa Timur pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 32,98% tetapi pada tahun 2011 secara prosentase turun, pertumbuhannya pada tahun 2011 sebesar 26,21%. Dikarenakan adanya krisis global pada tahun 2012 prosentase pertumbuhan Ekspor non Migas Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat tajam dengan prosentase sebesar (-)10,90% dan pada 2013 terdapat masih terdapat penurunan sebesar (-)3,03%. Nilai ekspor non migas Jawa Timur Tahun 2014 tercatat sebesar US$ US$ 17,98 Milliar atau mengalami peningkatan sebesar 19,45 persen jika dibandingkan dengan ekspor non migas tahun 2013 yang tercatat sebesar US$ 15,05 Milliar, tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar (-)8,27% dibanding tahun 2014 yaitu turun menjadi US$ 16,50 milyar. Pada tahun 2016 meskipun tidak mencapai target, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,77% atau mencapai US$ 17,94 milyar. Sementara untuk tahun 2018 nilai ekspor noin migas sebesar US$ 18,38 milyar mengalami pertumbuhan 2,43%, serta pada tahun 2019 pertumbuhan ekspor non migas Jawa Timur mencatatkan capaian sebesar 1,4%.

Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi kinerja *stake holder*, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, masalah perdagangan internasional adalah masalah bangsa, oleh karenanya upaya untuk mengatasinya memerlukan partisipasi semua pihak.

Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri dalam bentuk *Free Trade Agreement (FTA),* isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi penurunan ekonomi global. Penurunan ekonomi global dipengaruhi oleh perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Situasi ini secara akumulatif akan menurunkan kinerja ekonomi global yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor Provinsi Jawa Timur.

Tidak tercapainya target prosentase pertumbuhan ekspor non migas Jawa Timur tahun 2019 sebesar 7% dan hanya mencapai 1,4% tidak terlepas dari pengaruh kedua faktor di atas. Beberapa regulasi yang terkait dengan ketentuan ekspor beberapa produk yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti untuk ekspor produk industri kehutanan dan pertambangan implementasinya masih memberatkan eksportir tingkat UKM. Disisi lain, belum pulihnya krisis ekonomi yang melanda negara-negara besar yang selama ini menjadi tujuan ekspor yang potensial menjadi salah satu penyebab tertekannya eskpor. Selain itu menurunnya daya beli sebagai akibat melemahnya nilai rupiah terhadap US$ mengakibatkan dunia usaha mengurangi impor bahan baku/ bahan penolong maupun mesin/ peralatan. Berkurangnya pasokan bahan baku/ penolong tersebut menyebabkan kapasitas produksi berkurang, sehingga mengakibatkan ekspor juga berkurang.

Sebagaimana tersebut diatas, bahwa kegiatan eksportasi merupakan proses yang melibatkan mata rantai kegiatan yang cukup panjang, mulai dari bahan baku,

proses produksi, promosi, pemasaran, distribusi, fiskal, perbankan, regulasi serta sarana-prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu strategi yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pada tiap-tiap mata rantai kegiatan ekspor, antara lain :

1. *Pendekatan Kelembagaan*:

   a. Target melipat-tigakan ekspor dalam lima tahun ditetapkan sebagai Target Ekspor Nasional.
   b. Perlunya payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres), termasuk di dalamnya pembentukan Tim Pencapaian Target Ekspor Nasional (TIPTEN), agar menjadi komitmen nasional dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.

2. *Pendekatan Pasar:*

   a. Strategi pasar secara detail dirancang sesuai produk berdasarkan permintaan produk tersebut yang tinggi dan kemampuan ekspor Indonesia ke pasar tersebut masih relatif rendah sehingga potensial untuk dikembangkan serta mempertimbangkan sisi supply (komposisi bahan baku dan porsi output yang diekspor).
   b. Dari sisi pemasaran, diperlukan optimalisasi *market intelligence* yang dilakukan oleh Perwakilan Perdagangan (Atase Perdagangan) dan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* di semua negara perlu dioptimalkan untuk identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik, serta menjalin hubungan dengan *buyer* dalam rangka mempertahankan penguasaan pasar ekspor.
   c. Membentuk Promosi Terintegrasi (nasional dan internasional) untuk menyatukan visi-misi promosi yang selama ini terpecah di berbagai lembaga.
   d. Menggencarkan promosi di dalam negeri baik skala internasional, nasional, maupun daerah.
   e. Membangun Distribution Center di beberapa Negara, terutama yang sudah ada Kesepakatan Sister Province.

f. Meningkatkan pengamanan perdagangan produk Indonesia di pasar internasional (tuduhan *dumping, safeguards*, dan subsidi oleh negara tujuan ekspor).

3. *Pendekatan Regulasi/Kebijakan dan lain-lain:*

a. Melakukan sinkronisasi peraturan ekspor serta sosialisasi kepada stake holder dan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor.
b. Penerapan strategi hilirisasi, yaitu melakukan ekspor dalam bentuk produk-produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah.
c. Melibatkan Perguruan Tinggi untuk mengkaji produk dan pasar potensial Jawa Timur.
d. Penyusunan / pemetaan pengusaha potensial UKM yang berorientasi.
e. Pembuatan dashboard dengan memuat berbagai data/informasi ekspor impor yang dapat bermanfaat sebagai *Early Warning System (EWS)*.
f. Bantuan permodalan bagi IKM melalui lembaga keuangan/ perbankan.
g. Peningkatan kerjasama antar daerah/ provinsi.
h. Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
i. Koordinasi dengan stake holder dan dunia usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi eksportir.
j. Penyelenggaraan berbagai pelatihan ekspor.
k. Peran *market intelligence* Perwakilan RI di luar negeri, termasuk Atase Perdagangan (ATDAG) dan ITPC dalam identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik dilaksanakan dengan baik.
l. Berkurangnya kegiatan malpraktik perdagangan, antara lain perdagangan illegal fishing, perdagangan illegal logging, perdagangan illegal mining, dan under invoicing.

Dari Tabel 3.23 dapat dilihat, ekspor non migas Jawa Timur tahun 2019 nilainya US$ 18,38 milyar memberikan kontribusi sebesar 12,01% terhadap ekspor nasional, ekspor non migas Jawa Timur tahun 2017 nilainya mencapai US $ 17,94 milyar memberikan kontribusi sebesar 13,86% terhadap ekspor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai US$ 131,35 milyar. Sedangkan nilai impor Jawa Timur tahun 2018

mencapai nilai US$ 15,68 milyar memberikan kontribusi sebesar 13,41% terhadap impor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai US $ 116,92 milyar.

Tabel 3.25 : Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Jatim Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2011-2019)

No	Thn	Ekspor Jatim (us$ juta)	Ekspor Nasional **(US$ juta)**	*Kontribusi Jatim (%)*	Impor Jatim (us$ juta)	Impor Nasional (US$ juta)	*Kontribusi Jatim (%)*
1	2011	17.423,73	162.019,60	*10,75*	16.778,83	136.734,00	*12,27*
2	2012	15.524,17	153.042,80	*10,14*	17.741,21	149.125,30	*11,90*
3	2013	15.055,24	149.918,80	*10,04*	18.218,88	141.362,30	*12,88*
4	2014	17.983,98	145.960,80	*12,32*	17.909.03	134.718,90	*13,29*
5	2015	16.495,99	131.700,60	*12,53*	15.649,53	118.126,40.	*13,24*
6	2016	17.943,36	131.346,53	13,86	15.680,52	116.925,94	13,41
7	2017	18.380,78	152.990,30	12,01	17.851,40	132.585,40	13,46
8	2018	19.098,86	162.841,00	11,73	20.705,29	158.842,50	13,03
9	2019	19.365.75	154 989,01	12,49	18.930.30	148 836,60	12,72

Sumber Data : BPS Jawa Timur

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menyusun program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian impor yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Internasional, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 4.217.478.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.068.540.687,00 atau 96,47 %. Dengan Indikator Program yaitu : Net ekspor nonmigas (milyar US$) dengan target 6,44 Milyar US$ dan realisasi 0,43 Milyar US$. (6,68 %) tidak dapat memenuhi target.

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

2. Kegiatan Intensifikasi pelayanan ekspor
3. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor
4. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

B. PERMASALAHAN

- Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan ekspor – impor secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.
- Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini disebabkan oleh kulitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, kalaupun tersedia pada umumnya harga tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa berkesinambungan.
- Kebutuhan akan hasil-hasil pertanian belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
- Kurangnya daya saing produk dalam negeri menyebabkan semakin meningkatnya permintaan barang luar negeri yang mempunyai kualitas lebih baik, mengingat semakin membaiknya ekonomi masyarakat Jatim.
- Sumber Daya Manusia (SDM) industri dalam negeri belum optimal dalam penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.
- Lebih mahalnya biaya angkut antar pulau dibandingkan dengan luar negeri ikut mempengaruhi harga produksi dalam negeri sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi produk luar negeri.

C. SOLUSI :

- Perlu adanya dorongan investasi untuk membangun industry intermetiade di Indonesia yang memproduksi bahan baku industry untuk menekan impor bahan baku industry serta adanya pemberian insentif terhadap ongkos angkut antar pulau yang dapat menekan cost produksi.
- Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.
- Mendorong daya saing industry nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

3.2.3. SASARAN STRATEGIS TIGA

SASARAN 3 :

Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri

Untuk dapat mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri.

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga, serta analisa dari Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.26 : SASARAN STRATEGIS 3
Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3. Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	4	-	10,52	0,73	49,47	15,7	-4,47	-111,75	Sangat Kurang

Tabel 3.27 : Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	4	-4,47	-111,75

Tabel 3.28 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Startegis 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	4	15,7	-4,47

Tabel 3.29 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	**4,00**	**-4,47**	**-111,75**

Tabel 3.30 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th. 2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	**-4,47**	**-**	Berdasarkan data BPS, persentase pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah tidak ada, karena untuk level nasional tidak ada perdagangan antar daerah, yang ada perdagangan antar negara.
		2 Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim	**18,46**	**13,01**	- Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan Jatim tahun 2019 mencapai Rp.434,25 trilyun memberikan kontribusi sebesar 18,46 persen terhadap Total PDRB ADHB Jatim yang mencapai nilai sebesar Rp.2.352,43 trilyun pada tahun 2019 - Nilai PDB ADHB sektor Perdagangan Nasional tahun 2019 mencapai Rp.2.060,8 trilyun memberikan kontribusi sebesar 13,01 persen terhadap Total PDB ADHB nasional yang mencapai nilai sebesar Rp.15.833,9 trilyun pada tahun 2019
		3 Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Rp. Trilyun)	**185,71**	**-**	Berdasarkan data BPS, nilai net ekspor perdagangan antar daerah tidak ada, karena untuk level nasional tidak ada perdagangan antar daerah, yang ada perdagangan antar negara.

Tabel 3.31 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	**9.798.607.938**	**12,5**

Tabel 3.32 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1. Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	**4,00**	**-4,47**	**-111,75**	**9.798.607.938**	**9.342.125.539**	**95,34**

Tabel 3.33 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
3.	Meningkatnya Net ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1. Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah	**-111,75**	**95,34**	**-**

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran tiga adalah sebagai berikut :

3.2.3.1 Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah

Pertumbuhan net ekspor perdagangan tahun 2019 tercatat sebesar -4,47 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 4 persen, sebagaimana pada sasaran strategis tiga, sehingga persentase capaiannya sebesar -111,75 persen.

Pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah di Jawa Timur selama tahun 2015-2019 Jatim mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah di Jawa Timur pada tahun 2015 pertumbuhan net ekspor perdagangan sebesar 10,52%, tahun 2016 pertumbuhan sebesar 0,73%, tahun 2017 pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah sebesar 49,47%, tahun 2018 sebesar 15,70% sedangkan pada tahun 2019 ini pertumbuhan net ekspor perdagangan dalam negeri mengalami penurunan yaitu -4,47%. Pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah yang mengalami perlambatan pada tahun 2019

dikarenakan adanya krisis global yang berdampak pada daya jual beli masyarakat. Untuk pertumbuhan sub sektor perdagangan di tahun 2017 meningkat menjadi 6,26% jauh melampaui pertumbuhan sub sektor perdagangan nasional yang mencapai 4,44%. Di tahun 2018 pertumbuhan di Jawa Timur menunjukkan angka 6,29% melampaui pertumbuhan sub sektor Nasional yang berada di angka 4,97% dan di Tahun 2019 pertumbuhan di Jawa Timur menunjukkan angka 5,9% melampaui pertumbuhan sub sektor Nasional yang berada di angka 4,24%. Trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Jawa Timur hampir selalui melampaui trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Nasional seperti diilustrasikan dalam grafik 3.7.

Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Jatim tahun 2019 mencapai Rp.434,24 trilyun, tumbuh sebesar 6,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp.398,32 trilyun, serta memberikan kontribusi sebesar 21,07 persen terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp.2.060,8 trilyun pada tahun 2018.

Grafik 3.2 : Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Jatim Terhadap Nasional Thn 2013-2019

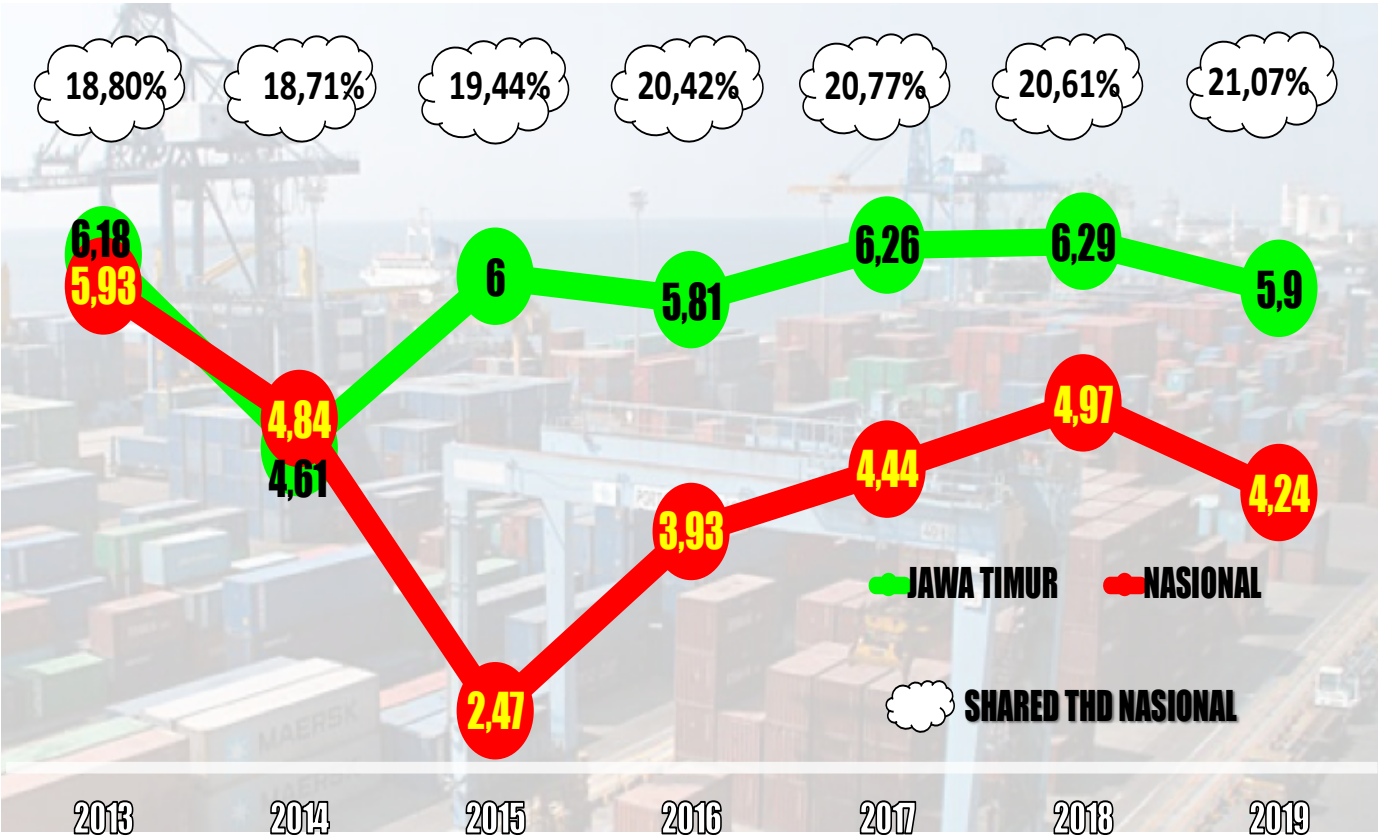

Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri

Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri Jawa Timur tahun 2019 tercatat sebesar 185,70 Trilyun Rupiah atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 130 Trilyun Rupiah, sehingga persentase capaiannya sebesar 142,84 persen.

Berdasarkan data BPS Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri Di Jawa Timur Pada tahun 2012-2018 terus mengalami kenaikan yang cukup bagus. Akan tetapi pada tahun 2019 dengan nilai net ekspor perdagangan dalam negeri sebesar 185,70 trilyun rupiah mengalami penurunan sebesar -4,47 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2018 sebesar 208,16 trilyun rupiah. Sedangkan Persentase pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri di Jawa Timur mengalami penurunan disebabkan oleh krisis global dan naiknya beberapa kebutuhan pokok lainnya. Upaya mendorong kinerja perdagangan dalam negeri (ekspor domestik), bagi Pemerintah Jawa Timur menjadi salah satu strategi yang hingga saat ini menjadi fokus utama dan diprediksikan akan terus meningkat.

Grafik 3.3 : Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri Jatim Tahun 2012–2019 (Rp. Triliun)

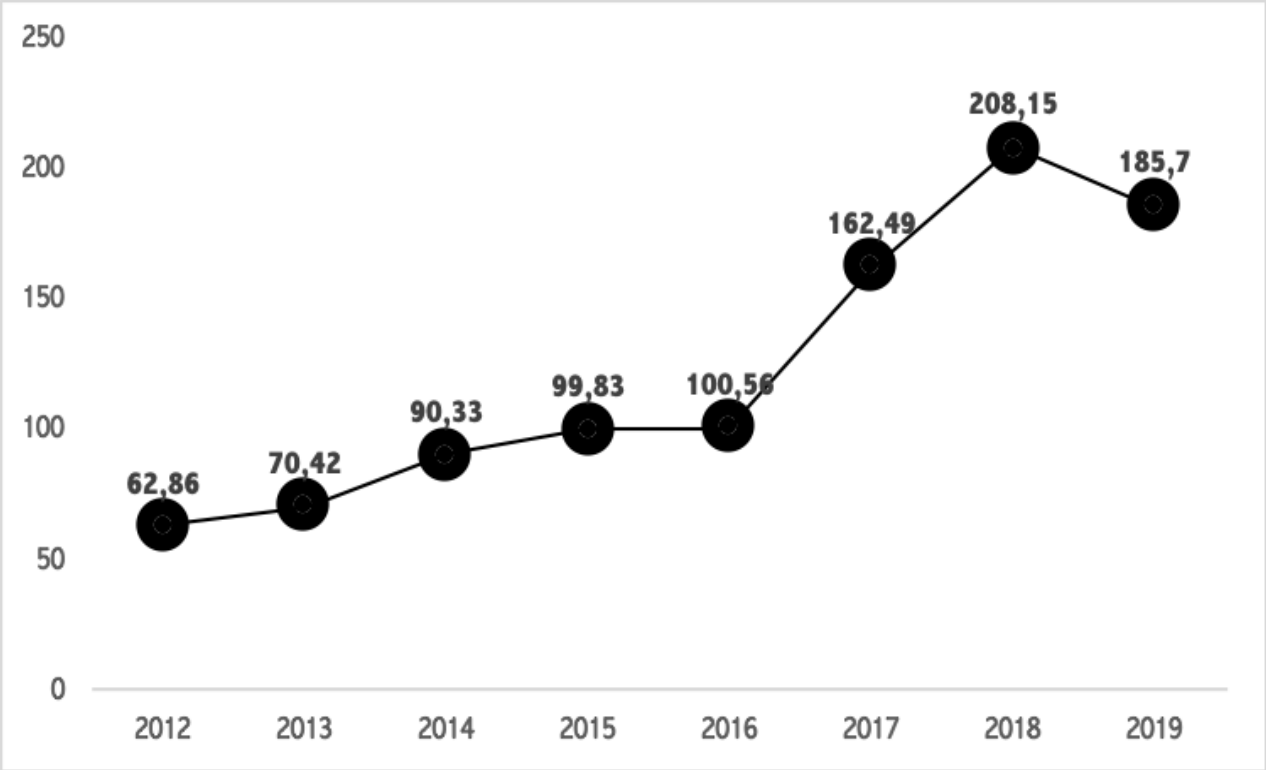

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menyusun program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Jawa Timur serta memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yang multilevel bukan saja kepada dunia usaha dan konsumen tetapi juga masyarakat, antara lain berupa :

- Jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui peningkatan pasar dan distribusi produk agro serta pembinaan pasar.
- Pengembangan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.
- Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
- Pemberdayaan pelaku usaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.
- Memajukan perdagangan antar pulau memulai pembukaan Kantor Perwakilan Dagang di Provinsi lain.
- Pemanfaatan secara optimal oleh para petani sistem resi gudang yang telah ada di beberapa daerah di Jawa Timur.

A. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 9.798.607.938,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.342.125.539,00 atau 95,34 %. Dengan Indikator Program yaitu : Net ekspor perdagangan dalam negeri (Rp trilyun) dengan target 130 trilyun dan realisasi Rp 185,71 trilyun. (142,85 %)

Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar
2. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang
3. Kegiatan Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD)
4. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
6. Kegiatan Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen
7. Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyrakat Melalui Promosi Dalam Negeri

B. PERMASALAHAN :

- Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Jatim seperti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.
- Data bongkar dan muat komoditi Jawa Timur ke Provinsi Mitra belum dapat diperoleh secara detail karena tidak berlakunya Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) dan Data Pelindo tidak mencatat secara detail data didalam kontainer.
- Sistem Resi Gudang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh para petani Jawa Timur, dan komoditi yang dapat disimpan juga masih terbatas
- Masih banyak dan sering terjadi disparitas harga antara kab / kota satu dengan yang lain.
- Masih rendahnya pertumbuhan net ekspor antar daerah lebih disebabkan karena penurunan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap produk-produk Jawa Timur mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan pertumbuhan net ekspor antar daerah.

C. SOLUSI :

- Tim Pengendali Inflasi Jawa Timur perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi terutama petani barang kebutuhan pokok terkait dengan kontiyuitas produksi.
- Guna menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan temu usaha dengan provinsi mitra, diharapkan pelaksanaannya dilakukan setelah data mitra usaha dikedua provinsi tersedia.
- Agar resi gudang bermanfaat bagi petani, maka selain sosialisasi, perlu adanya subsidi untuk biaya transport dan biaya penyimpanan komoditi digudang serta pendampingan pengelolaan gudang yang kompeten dan profesional
- Perlu adanya regulasi yang mengikat untuk komoditi agro dapat di transaksikan pada kegiatan Pasar Lelang yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga petani tidak dirugikan dalam menjual produknya
- Diperlukan pelayanan informasi publik yang transparan kepada masyarakat sehingga dapat memperkecil disparitas harga.
- Evaluasi dan Optimalisasi peran Kantor Perwakilan Dagang dimasing masing provinsi mitra.

OPTIMALISASI PERAN KPD DALAM RANGKA MENINGKATKAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Optimalisasi peran KPD untuk meningkatkan net ekspor antar daerah ke depan perlu terus didorong dan diperkuat, melalui komitmen awal seperti berikut ini :

a. Aspek Market Intelegent :

1) Menemu-kenali kebutuhan konsumen provinsi setempat yang dapat dipasok dari komoditas asal Jawa Timur;

2) Menumbuhkan jaringan komunikasi dengan Produsen dan/atau Pedagang-pedagang asal Provinsi Jatim, khususnya yang komoditasnya dapat memenuhi kebutuhan di provinsi setempat;

3) Menemu-kenali Produsen dan/atau Pedagang-pedagang setempat yang potensial untuk diberikan fasilitasi bisnis oleh KPD dengan Produsen dan/atau Pedagang-pedagang asal Jawa Timur;

4) Memberikan dukungan dan akses pada pada setiap misi pemasaran atau dagang yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun melalui misi dari Disan sektor atau OPD sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur, termasuk melalui pasar lelang komoditas, bisnis off-line dan on-line, program business matching dari Kementerian Perdagangan.

b. Aspek Fasilitasi Bisnsis, melakukan fasilitasi bisnis dengan menyambungkan transaksi bisnis antara produsen/pedagang provinsi setempat dengan produsen/pedagang provinsi Jawa Timur, di awali dengan target "1 komoditas dari Jawa Timur" dan "1 komoditas ke Jawa Timur".

c. Aspek Reportase Transaksi Dagang, sepatutnya dapat disepakati durasi waktu penyempaian laporan (boleh jadi dilakukan 1 kali per bulan atau 1 kali per kwartal), dengan mengambil data dari :

1) Transaksi bisnis yang difasilitasi oleh KPD itu sendiri;

2) Bongkar muat barang di Pelabuhan, Bandara, Pasar Induk dan Biro Ekspedisi swasta.

Beberapa dukungan yang diperlukan untuk penguatan kelembagaan KPD dan perlu dukungan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah :

a. Kepastian Positioning KPD di masa depan, boleh jadi diambil alih pembinaannya oleh Kementerian Perdagangan menjadi agen dari PT. PPI (Persero) atau membentuk Badan Hukum tersendiri bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Dukungan pembinaan teknis dan program, di antaranya : pengembangan media online untuk fasilitasi bisnis, pengembangan sistem knowledge management untuk penguatan kapasitas personil KPD, serta penguatan dukungan dan peran dalam setiap misi pemasaran atau dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2.4. SASARAN STRATEGIS EMPAT

SASARAN 4 :

Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Untuk dapat mewujudkan penguatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang keempat, yaitu meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Dalam sasaran strategis yang keempat ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat, serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.34 : SASARAN STRATEGIS 4
Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian						% Capaian	Kategori
	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1. Persentase Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk	1,00	7,84	3,12	2,42	-36,7	10,90	16,95	1.695	Sangat Baik
2. Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	2,00	-	-	-	2,03	3,7	3,31	165,5	Sangat Baik

Tabel 3.35 : Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk	1,00	16,95	1.695
		2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	2,00	3,31	165,5

Tabel 3.36 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Startegis 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk	**1,00**	**10,90**	**16,95**
		2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	**2,00**	**3,7**	**3,31**

Tabel 3.37 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk.	**1,00**	**16,95**	**1.695**
		2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	**2,00**	**3,31**	**165,5**

Tabel 3.38 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1 Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk	**10.383.453.750**	**13,2**
		2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	**5.469.904.000**	**7**

Tabel 3.39 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/ Produk	**1**	**16,58**	**1.658**	**10.383.453.750**	**9.719.001.442**	**93,60**
	4 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	**2**	**3,31**	**165,5**	**5.469.904.000**	**5.276.618.348**	**96,47**

Tabel 3.40 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk	**1.658**	**93,60**	-
		5 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar	**165,5**	**96,47**	-

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran empat adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk

Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk tahun 2019 tercatat sebesar 16,95 persen atau diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,00 persen, sebagaimana ditetapkan pada sasaran strategis empat, Indikator Kinerja Utama Pertama, sehingga capaian nya sebesar 1.695 persen.

Pada Indikator Pertumbuhan Sertifikasi mutu/komoditi pada RENSTRA 2014-2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memegang peran penting dalam hal ini adalah UPT PSMB-LT Surabaya dan UPT PSMB-LT Jember dimana pada tahun 2018 jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 6.795 Sertifikat, pada tahun 2019 jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 7.947 Sertifikat atau naik sebesar 16,95.

Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya volume pengujian mutu, sampling dan inspeksi dari beberapa komoditi, diantaranya; pupuk, biji kopi dan biji kakao. Ditambah dengan meningkatnya jumlah produksi pupuk organik mitra PT. Petrokimia Gresik yang berimbas pada peningkatan jumlah sampling sebagai bentuk *quality control*. Selain itu, Laboratorium Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya pada bulan Pebruari 2019 sudah terakreditasi kembali oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sehingga dunia usaha dapat menggunakan kebutuhan jasa kalibrasi sebagai persyaratan untuk proses kepengurusan ijin dan sebagainya.

Tabel 3.41 : PERKEMBANGAN SERTIFIKASI MUTU KOMODITI / PRODUK THN 2011 – 2019

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengambilan Contoh	1.221	701	740	617	761	428	104	253	1.277
2	No Akreditasi LP-036-IDN	1.181	1.213	1.545	1.455	1.453	1.126	931	1.412	1.507
3	No Akreditasi LK-030-IDN	1.356	1.441	1.532	2.415	3.440	4.317	1.311	777	1.917
4	No Akreditasi LS Pr-008-IDN	151	188	160	161	181	133	126	82	75
5	Pengujian Mutu ISO 17025 No Akreditasi LP -035-IDN	991	1734	1480	1491	1194	990	272	306	280
6	Inspeksi Mutu ISO 17020 No Akreditasi LI -029-IDN	2.328	2.696	3.038	3.022	2.418	2.658	2141	2.912	2.804
7	No Akreditasi LK-214-IDN	-	-	-	-	-	24	28	43	2
8	Desiminasi Sosialisasi							1.214	1.008	36
9	Sertifikasi Mutu Produk 17065 No. Akreditasi LsPR-070-IDN	-	-	-	-	-	-	-	2	49
	TOTAL	**7.228**	**7.973**	**8.495**	**9.161**	**9.447**	**9.676**	**6.127**	**6.795**	**7.947**

3.2.4.2 Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar

Jumlah temuan barang beredar tahun 2019 tercatat sebesar 46.706 dari 1.406.996 jumlah barang yang diawasi, sehingga persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar sebesar 3,31%, sedangkan target yang ditetapkan pada sasaran strategis empat yakni 2,00 persen. Sehingga capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 165,5 persen.

Pada indikator jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar tahun 2019 pada RENSTRA 2014-2019 telah ditetapkan target sebesar 2%, sedang realisasi sebesar 3,31%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja 5 (lima) UPT PK di Jawa Timur meningkat, barang yang diawasi di tahun 2019 lebih banyak dari tahun 2018. Sehingga terdapat 3,31% jumlah barang yang belum sesuai dengan ketentuan perundangan, seperti Manual Kartu Garansi (MKG), produk SNI dan label bahasa Indonesia. Peran Perlindungan Konsumen masih perlu ditingkatkan lagi di tengah gencarnya produk-produk impor yang masuk. Selain itu, pada situasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan fasilitasi

dalam pengembangan mutu produk seperti Kekayaan Intelektual, merk dan hak cipta bagi pelaku usaha dan pelaku industri.

Tabel 3.42 : PERKEMBANGAN KINERJA UPT-PK 2017-2019

UPT-PK	Jumlah Barang yang diawasi			Jumlah Temuan			Jumlah Teguran			Pembinaan			Jumlah Pengaduan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
SURABAYA	32.302	40.243	393.382	562	1.294	18.666	98	91	248	150	200	1.779	50	128	241
MALANG	29.750	38.291	255.008	528	1.416	18.915	106	60	0	150	200	1.392	22	35	12
JEMBER	21.352	36.517	234.420	443	1.218	4.485	88	89	156	200	150	450	9	37	67
BOJONEGORO	18.472	34.430	320.170	426	1.495	725	99	108	50	150	250	100	82	42	8
KEDIRI	25.752	40.555	204.016	641	1.640	3.915	102	`1329	4	150	216	1.168	8	6	19
JUMLAH	127.628	190.036	1.406.996	2.600	7.063	46.706	493	487	458	800	1.016	4.889	171	248	347

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis keempat, yaitu Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, telah menyusun program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yang di laksanakan oleh 5 Unit kerja, antara lain :

1. UPT PSMB-LT Surabaya,
2. UPT PSMB-LT Jember,
3. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya,
4. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro,
5. UPT Perlindungan Konsumen Kediri,
6. UPT Perlindungan Konsumen Malang,
7. UPT Perlindungan Konsumen Jember.

A. Program pendukung kinerja Perlindungan Konsumen

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini dilaksanakan oleh 5 (lima) UPT Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya,
2. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro,
3. UPT Perlindungan Konsumen Kediri,
4. UPT Perlindungan Konsumen Malang,
5. UPT Perlindungan Konsumen Jember.

Pagu anggaran Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.469.904.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 5.276.618.348,00 atau 96,47 %. Dengan Indikator Program yaitu : Jumlah Barang yang diawasi (unit) dengan target 780 unit dan realisasi 944.799 unit. (121.128,08 %)

Program ini didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya.
2. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya.
3. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya.
4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang.
5. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang.
6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang.
7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember.
8. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember.
9. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember.
10. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro.
11. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro.
12. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro.
13. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri.
14. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri.

15. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri.

b. Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT PSMB - LT, antara lain :

1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Surabaya,
2. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Jember,

Pagu anggaran Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.383.453.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.719.001.442,00 atau 93,60 %. Dengan Indikator Program yaitu : Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan (sertifikat) dengan target 7.933 sertifikat dan realisasi 7.143 sertifikat. (90,04 %)

Program ini didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Surabaya.
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya
3. Kegiatan Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya
4. Kegiatan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember
6. Kegiatan Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember
7. Kegiatan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jember
8. Kegiatan Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Jember
9. Kegiatan Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Surabaya
10. Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya
11. Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember

B. PERMASALAHAN :

1. Laboratorium Kalibrasi

   Kinerja peralatan *mass comparator* laboratorium kalibrasi dengan kapasitas 210 gram dan daya baca 0,01 mg sudah di luar batas keberterimaan sehingga menyulitkan proses kalibrasi peralatan *volumetric glassware* dan POVA. Oleh karena itu, pengembangan lingkup akreditasi untuk kedua jenis peralatan tersebut masih belum dapat diajukan. Dan proses perbaikan *mass comparator* terkendala karena tipe produk tersebut sudah tidak diproduksi lagi (*discontinued*) sehingga sangat sulit untuk mencari suku cadangnya.

2. Laboratorium Pengujian

   a. Laboratorium Pengujian UPT. PSMB-LT Surabaya mendapatkan penunjukkan dari Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri (Permenperin) untuk melaksanakan pengujian **produk-produk berdasarkan SNI wajib**, namun belum seluruh parameter dapat diajukan ke dalam lingkup akreditasi laboratorium pengujian karena terbatasnya peralatan untuk menguji parameter yang ditunjuk. Hal ini merupakan kendala karena Permenperin mempersyaratkan bahwa laboratorium yang ditunjuk harus terakreditasi dalam lingkup penunjukkan paling lambat dalam 2 tahun setelah Permenperin tersebut berlaku atau status penunjukkan untuk laboratorium akan dicabut.

   Berikut ini penunjukkan oleh Permenperin terhadap laboratorium pengujian:

KOMODITI	PERMENPERIN	KENDALA
Minyak Goreng Sawit	Permenperin No. 17 Tahun 2017	Parameter Vitamin A dan Warna belum terakreditasi KAN
Pupuk Anorganik (Urea, ZA, KCl, TSP, SP-36, Rock Phosphate, NPK Padat)	Permenperin No. 11 Tahun 2018	Peralatan untuk menguji Nitrogen sudah berkurang reabilitasnya.
Tepung Terigu	Permenperin No 21 Tahun 2018	Belum terkareditasi pada vitamin B, Falling Number dan Mikrobiologi.

KOMODITI	PERMENPERIN	KENDALA
Garam Konsumsi Beryodium	Permenperin No.10 Tahun 2019	Seluruh parameter terakreditasi oleh KAN
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Permenperin No.4 Tahun 2019	Parameter cemaran mikrobiologi dan cemaran logam belum terkareditasi oleh KAN.
Asam Sulfat Teknis	Permenperin No. 56 Tahun 2014	Belum dikenal pada industry smelter maupun produsen Asam sulfat pekat teknis lainnya.
Biskuit	Permenperin No. 07 Tahun 2016	Belum terakreditasi untuk seluruh parameter.

Penambahan peralatan analisa pengujian maupun revitalisasi peralatan sulit untuk dilakukan karena jumlah anggaran yang cenderung berkurang tidak mendukung percepatan pelayanan dan pengembangan lingkup pelayanan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

b. Jumlah pejabat fungsional PMB (jenjang Keterampilan) yang melakukan pengujian tidak sebanding dengan jumlah ruang lingkup pelayanan dan jumlah sampel yang masuk sehingga sering mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penerbitan hasil pengujian;

3. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)
   a. Lingkup akreditasi Lembaga sertifikasi masih kurang dapat mengakomodasi kebutuhan sertifikasi produk/kesesuaian di pasar;
   b. Perlu penambahan personil untuk membantu administrasi pelayanan sertifikasi.
4. Bertambahnya jumlah kompetitor, baik untuk laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian dan Lembaga sertifikasi produk.

5. Proses pengolahan informasi di laboratorium masih belum mengoptimalkan jaringan teknologi informasi untuk mempercepat pertukaran informasi, pemutakhiran data dan pemeliharaan keamanan serta akurasi data.
6. Pendekatan dengan LPK maupun instansi pemerintah yang lain yang masih kurang sehingga jejaring informasi dan komunikasi serta kerjasama belum dapat dilakukan secara maksimal.
7. Masih kurang dikenalnya pelayanan di UPT. PSMB-LT Surabaya di kalangan dunia usaha Jawa Timur.
8. Munculnya peraturan daerah yang menghapus tarif pelayanan kalibrasi dan sertifikasi produk di UPT. PSMB-LT. Hal ini berpotensi menurunkan jumlah PAD UPT. PSMB-LT Surabaya yang dapat berakibat menurunnya dukungan terhadap keberadaan kedua jenis peralatan tersebut sementara keduanya masih dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya di Jawa Timur.
9. Uji beras hanya dilakukan sekali
10. Penerimaan contoh banyak diakhir tahun sehingga penerbitan sertifikat diawal tahun 2020
11. Pasar rakyat wilayah kerja UPT PSMB-LT Jember belum siap disertifikasi karena belum sesuai SNI
12. Penurunan alokasi anggaran untuk kegiatan diseminasi
13. Kurangnya SDM Tenaga PPNS, Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) sehingga pelaksanaan pengawasan kurang optimal.
14. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan.

C. SOLUSI :

1. Perlu pengadaan peralatan *mass comparator* yang dapat menunjang kinerja laboratorium kalibrasi untuk memberikan hasil kalibrasi yang akurat dan mengembangkan lingkup akreditasi *volumetric glassware* dan POVA yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
2. Laboratorium pengujian membutuhkan dukungan berupa:
   a. penambahan maupun revitalisasi peralatan untuk peralatan Analisa laboratorium pengujian;,
   b. penambahan tenaga fungsional PMB jenjang keterampilan dan penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan; serta
3. Lembaga sertifikasi produk perlu melakukan:
   a. Pengembangan lingkup akreditasi sesuai dengan potensi daerah Jawa Timur;
   b. Penambahan tenaga administrasi untuk membantu proses pelayanan sertifikasi produk.
4. Mengembangkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif organisasi untuk menarik kepercayaan pelanggan agar memilih untuk menggunakan pelayanan di UPT. PSMB-LT.
5. Penguatan sistem internal dengan membangun jaringan informasi yang berbasiskan teknologi digital untuk mempercepat pengolahan dan pertukaran informasi intra organisasi sehingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta menjaga pemutakhiran data untuk mengetahui kinerja organisasi secara riil.
6. Membangun jejaring dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang lain untuk dapat terus memperbaharui informasi dan perkembangan yang ada.
7. Perlu adanya publikasi terhadap UPT. PSMB-LT Surabaya untuk lebih memperkenalkan pelayanan yang ada kepada masyarakat, khususnya dunia usaha di Jawa Timur.
8. Menjadikan UPT. PSMB-LT Surabaya sebagai BLUD agar lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan.
9. Pembinaan pasar melalui koordinasi dengan pihak PDN

10. Perlu penambahan SDM untuk dididik dan bersertifikat yang selanjutnya dapat berfungsi sebagai Tenaga PPNS dan PPBJ di tiap UPT-PK.
11. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan termasuk kepada siswa SMA dan SMK melalui pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

D. HAL HAL / LANGKAH LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN :

1. UPT. PSMB-LT Surabaya telah membuat proposal untuk kebutuhan pengadaan *mass comparator* yang dibutuhkan.
2. UPT. PSMB-LT Surabaya telah:
   a. Berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan dana ataupun dukungan yang tidak didapat dari pemerintah daerah.
      Pada tahun 2019, UPT. PSMB-LT Surabaya mendapatkan bantuan pembelian 2 unit peralatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar, yaitu berupa ICP OES dan HPLC.
      - ICP OES digunakan dalam pengembangan lingkup akreditasi produk pupuk organik. Saat ini kebutuhan akan analisa pupuk organik meningkat akibat kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian.
      - HPLC digunakan untuk pengembangan lingkup akreditasi produk Minyak Goreng Sawit parameter Vitamin A.
   b. Telah membuat telaahan terkait kebutuhan tenaga fungsional PMB Terampil dan menerima peserta magang dari SMK Kimia untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga analis dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.
3. Lembaga sertifikasi produk telah:
   a. Mengembangkan lingkup akreditasi Pasar Rakyat untuk mengantisipasi kebutuhan akan pasar ber-SNI di Jawa Timur;
   b. Mengajukan penambahan personil untuk membantu proses administrasi pelayanan sertifikasi produk.
4. Mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatir dengan:
   - menjaga biaya pelayanan tetap lebih murah bila dibandingkan dengan pelayanan sejenis yang disediakan oleh sektor swasta;
   - kompetensi SDM yang unggul melalui keikutsertaan dan penyelenggaraan pelatihan sehingga personil dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan teknis pelanggan dengan memuaskan terkait pelayanan yang diberikan;

- pelayanan yang akurat dan cepat karena sebagian pengujian parameter telah didukung oleh peralatan teknologi tinggi.

5. Sebagai tahap awal, UPT. PSMB-LT Surabaya telah menganggarkan pembuatan aplikasi *document control* di tahun 2020 sekaligus sebagai dukungan gerakan *paperless* melalui optimalisasi teknologi digital.
6. Membangun jejaring dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang lain melalui pengadaan uji banding maupun keikutsertaan dalam program uji profisiensi maupun uji banding antar laboratorium kalibrasi.
7. Membuat brosur dan mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8. Sedang dalam proses mencari informasi terkait proses transformasi menjadi BLUD.
9. Promosi layanan melalui leaflet/ website/media sosial

E. REKOMENDASI / RENCANA TINDAK LANJUT KEDEPAN :

1. Tetap mengusulkan pembelian *mass comparator* baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Laboratorium pengujian akan:
   a. Mengusulkan pembelian peralatan melalui dana APBN dan APBD untuk peralatan *elemental analyzer* (dengan metode Dumas).
   b. Menyiapkan pengembangan lingkup akreditasi untuk:
      - Pupuk organic dan AMDK. Kedua lingkup ini masih akan membutuhkan pengembangan laboratorium mikrobiologi.
      - dengan adanya HPLC, laboratorium pengujian akan mencoba masuk ke dalam pengujian produk makanan yang memiliki pangsa pasar besar namun jumlah laboratorium pengujian yang cukup terbatas.
   c. Mengajukan penambahan tenaga fungsional PMB kategori keterampilan, baik dari jalur PNS maupun PPPK. Penambahan personil dengan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan agar dapat mendukung pemeliharaan dan pengembangan ruang lingkup akreditasi.

3. Lembaga Sertifikasi Produk akan:
   a. Menyelaraskan pengembangan lingkup akreditasi Lembaga sertifikasi produk dengan kemampuan laboratorium pengujian agar pengembangan lingkup yang dilakukan dapat didukung langsung oleh laboratorium pengujian dan saling bersinergi untuk penambahan PAD;
   b. Mengajukan penambahan tenaga administrasi dari jalur PPPK.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan peralatan agar kinerjanya dapat dijaga sesuai dengan spesifikasi alat.
5. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan system informasi digital secara rutin.
6. Melaksanakan 2 x kegiatan/ setahun dalam rangka promosi layanan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1 PENDAPATAN ASLI DARAH (PAD) TAHUN 2019

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar Rp. 4.295.534.000.00,- Realisasinya sebesar Rp. 4.464.020.635,80,- (103,92%). Adapun sumber/unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.43 dibawah ini :

Tabel 3.43 : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

NO	SUMBER/UNIT PENGHASIL	TARGET	REALISASI	%
1.	Pel. Pendidikan dari UPT Ind. Logam Perekayasaan Sidoarjo	60.000.000,00	57.400.000,00	95,67%
Jumlah Retribusi Pelayanan Pendidikan		**60.000.000.00**	**57.400.000.00**	**95,67 %**
3.	UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang & LT Surabaya	1.650.000.000	1.760.095.424,00	106,67%
4.	UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang & LT Jember	870.675.000	989.250.807,80	113,62%
6.	UPT Ind. Logam Perekayasaan Sidoarjo	630.000.000	802.496.475,00	127,38%
7.	UPT Ind Kulit & Produk Kulit Magetan	360.000.000	180.861.350,00	50,24%
8.	UPT Ind Kayu & Produk Kayu Pasuruan	250.000.000	229.931.100,00	91,97%
9.	UPT Aneka Ind & Kerajinan di Surabaya	170.000.000	123.698.500,00	72,76%
10.	UPT Ind Makanan, Minuman & Kemasan di Surabaya	35.000.000	35.863.000,00	102,47%
Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		**3.965.675,000.00**	**4.122.196.656,80**	**103,95%**
11.	UPT Aneka Industri & Kerajinan di Surabaya	140.000.000.00	140.147.950.00	100,11%
Jumlah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		**140.000,000.00**	**140.147.950.00**	**100,11%**
12.	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	12.159.000	15.464.000,00	127,18%
13.	Pendapatan Sewa Tanah	27.700.000	27.700.000,00	100,00%
Hasil Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan		**39.859.000**	**43.164.000.00**	**108,29%**
14.	Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir	90,000,000.00	33.222.288.00	36,91%
15.	Pendapatan denda retribusi jasa usaha (LIK) dan Pengembalian Belanja	-	67.889.741.00	-
Jumlah Pendapatan Daerah		**90,000,000.00**	**101.112.029.00**	-
GRAND TOTAL		**4.295.534.000.00**	**4.464.020.635.80**	**103,92%**

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Sekretariat - Disperindag Prov. Jatim

3.3.2 REALISASI APBD 2019

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 149.932.919.000,-Realisasinya sebesar Rp. 142.572.647.614,- (95,09%), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 71.282.116.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.719.183.852,- (95 %) Sisanya sebesar Rp. 3.562.932.148,- (5 %);
- Belanja Langsung sebesar Rp. 78.650.803.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.853.463.762,- (95,17%) Sisanya sebesar Rp. 3.797.339.238,- (4,83 %), dengan rincian sbb:
  - **Belanja Pegawai** Pagu sebesar Rp. 16.514.195.500,- Realisasi sebesar Rp. 15.279.327.019,- (92,52 %) Sisanya sebesar Rp. 1.234.668.481,- (7,48 %).
  - **Belanja Barang dan Jasa,** Pagu sebesar Rp. 54.086.449.150,- Realisasi sebesar Rp. 51.466.046.049,- (95,16%) Sisanya sebesar Rp. 2.619.403.101,- (4,84%).
  - **Belanja Modal,** Pagu sebesar Rp. 8.051.158.350,- Realisasi sebesar Rp. 7.723.345.194,- (95,93%) Sisanya sebesar Rp. 327.813.156,- (4,07%), Realisasi Per Program, sebagai berikut :

Tabel 3.44 : Realisasi Anggaran APBD Per Program Tahun 2019

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	5.469.904.000,-	5.276.618.348,-	96,47	193.285.652,-	3,53
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9.798.607.938,-	9.342.125.539,-	95,34	456.482.399,-	4,66
Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	4.217.478.000,-	4.068.540.687,-	96,47	148.937.313,-	3,53
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10.383.453.750,-	9.719.001.442,-	93,60	664.452.308,-	6,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.647.621.000,-	5.380.690.341,-	95,27	266.930.659,-	3,73
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.246.204.400,-	6.809.921.083,-	93,98	436.283.317,-	6,02
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	915.966.000,-	831.890.496,-	90,82	84.075.504,-	9,18
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.744.704.162,-	1.625.694.615,-	93,18	119.009.547,-	6,82
Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	17.885.422.750,-	17.180.996.649,-	96,06	704.426.101,-	3,94
Program Peningkatan Standarisasi Industri	5.341.417.500,-	5.137.966.106,-	96,19	203.451.394,-	3,81
Program Pengembangan Industri Agro	4.549.800.000,-	4.256.733.307,-	93,56	293.066.693,-	6,44
Program Pengembangan Industri Non-Agro	2.724.442.000,-	2.623.041.353,-	96,28	101.400.647,-	3,72
Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan	2.725.781.500,-	2.600.243.796,-	95,39	125.537.704,-	4,61
BELANJA LANGSUNG	78.650.803.000,-	74.853.463.762,-	95,17	3.797.339.238,-	4,83
BELANJA TIDAK LANGSUNG	71.282.116.000,-	67.719.183.852,-	95,00	3.562.932.148,-	5,00
TOTAL BELANJA	149.932.919.000,-	142.572.647.614,-	95,09	7.360.271.386,-	10,08

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Sekretariat - Disperindag Prov. Jatim

3.3.3 REALISASI APBN 2019

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi APBN dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dengan total nilai sebesar **Rp.7.101.689.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.6.053.757.166,-** (85,24%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.1.047.931.834,-** (14,76%). Realisasi per Program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.45
Realisasi APBN Tahun 2019

NO.	SUMBER / PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI		SISA	
			DANA (RP.)	%	DANA (RP.)	%
I.	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI.**	***3.875.400.000***	***3.599.959.555***	***92,89***	***275.440.445***	***7,11***
1.	**Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka**	**3.875.400.000**	**3.599.959.555**	**92,89**	**275.440.445**	**7,11**
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi SDM Industri Kecil, Menengah dan Aneka	3.875.400.000	**3.599.959.555**	**92,89**	**275.440.445**	**7,11**
II.	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI.**	***3.226.289.000***	***2.453.797.611***	***76,06***	***772.491.389***	***23,94***
1.	**Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**	**2.242.058.000**	**1.595.355.949**	**71,16**	**646.702.051**	**28,84**
	Kegiatan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah	**2.242.058.000**	**1.595.355.949**	**71,16**	**646.702.051**	**28,84**
2.	**Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri**	**984.231.000**	**858.441.662**	**87,22**	**125.789.338**	**12,78**
	Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	**984.231.000**	**858.441.662**	**87,22**	**125.789.338**	**12,78**
TOTAL (I+II)		***7.101.689.000***	***6.053.757.166***	***85,24***	***1.047.931.834***	***14,76***

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Sekretariat – Disperindag Prov. Jatim

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Perindag Tahun 2014-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mendapat predikat dengan Kategori **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) Sasaran Strategis : Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase Kontribusi

Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim dengan kategori **sangat baik.**

TUJUAN 2 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 3 (tiga) Sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama.

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Non Migas dengan kategori **sangat baik.**
- Sasaran Strategis : Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama : Persentase Pertumbuhan Net Ekspor Perdagangan Antar Daerah dengan kategori **sangat kurang.**
- Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama : 1. Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk dengan kategori **sangat baik**; 2. Persentase Jumlah Temuan Dalam Pengawasan Barang Beredar dengan kategori **sangat baik.**

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

- Persentase pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah;

Disamping permasalahan tersebut sektor industri pengolahan Jawa Timur masih menghadapi beberapa permasalahan seperti :

- *Hight Cost Economic* yang disebabkan oleh regulasi yang kurang menguntungkan Industri Dalam Negeri seperti ketidakpastian regulasi dan pajak ekspor.
- Kurangnya Penguasaan teknologi industri serta minimnya akses permodalan, pemasaran.
- Belum optimalnya pemahaman prosedur perijinan melalui OSS oleh pelaku usaha.
- Produk hasil industri Jatim masih belum bisa bersaing dengan produk impor, terutama dalam hal harga.
- Kenaikan Upah Buruh (UMK), kenaikan TDL, ketidakpastian pasokan energi;
- Marjin/Keuntungan Industri Pengolahan masih relatif stagnan terutama dipicu oleh kenaikan UMR dan biaya-biaya produksi lainnya.
- Belum siapnya pasokan bahan baku lokal yang berdampak pada ketergantungan pada bahan baku impor;
- Beban biaya bahan baku dan biaya lahan khususnya di pulau Jawa menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan..
- Masih relatif tingginya biaya produksi juga direspon pelaku usaha dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang;

Sedangkan persoalan yang terkait dengan perdagangan antara lain seperti :

a) Perdagangan bebas mengakibatkan membanjirnya barang-barang impor yang masuk dengan menawarkan harga produk yang lebih mudah dibandingkan dengan produk domestik/lokal. Harga produk impor yang murah ini mampu menarik minat beli masyarakat sehingga produk lokal kalah bersaing terutama dari aspek harga;
b) Sarana dan prasarana toll trans Jawa sudah cukup memadai, sehingga dari segi waktu sudah efisien tetapi masih kurang efisien dari segi biaya selain komoditi yang mudah rusak.
c) Belum optimalnya peran/fungsi Kantor Perwakilan Dagang Jatim terhadap peningkatan ekspor antar daerah.
d) Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.
e) Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah.
f) Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
g) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard yang jarang digunakan;
h) Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;
i) Masih rendahnya pertumbuhan net ekspor antar daerah lebih disebabkan karena penurunan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap produk-produk Jawa Timur mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan pertumbuhan net ekspor antar daerah.

4.3 REKOMENDASI

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

a) Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Jawa Timur. Informasi dan kebijakan tersebut didesain berbasis digital sehingga lebih mudah diakses. Agar bisa menyentuh kalangan pengusaha milenial maka informasi dan kebijakan juga bisa siapkan dalam bentuk tutorial yang bisa diunduh melalui medsos.
b) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dgn stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro. Untuk lebih menambah daya tarik penggunaan bahan baku lokal perlu dipromosikan kepada para pengusaha sektor industri tentang kelebihan-kelebihan bahan baku lokal, mulai dari aspek standarisasi produk, kontinyuitas, harga, kemudahan delivery dan biaya logistik yang murah.
c) Perlu adanya Instrumen safeguard untuk pengamanan perdagangan dalam bentuk bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).
d) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan. Selain pelatihan, pembinaan juga dilakukan dengan melakukan pendampingan secara intensif muali dari aspek input, bahan baku, teknologi produksi, standar kompetensi SDM, akses ke lembaga keuangan, akses ke pasar domestik dan internasional.
e) Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat hight cost economic, Upah Buruh, kenaikan TDL, dll.
f) Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku

dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing. Untuk membangun industri bahan baku maka perlu didesain skema insentif investasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

g) Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi KPD untuk meningkatkan ekspor antar daerah Jatim. Peningkatna peran KPD diawali dengan menerapkan standar passion, integrity dan skill.

h) Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat/law enforcement harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;

i) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Atase Perdagangan, ITPC diluar negeri dan KADINDA Jawa Timur untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi di Jawa Timur.

j) Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Jawa Timur sebagai alternatif pengganti barang-barang impor (substitusi impor). Pemetaan potensi Sumber Daya Alam dari provinsi mitra yang bisa dijadikan substitusi bahan baku impor diuplod ke dalam sistem informasi perdagangan sehingga keberadaan bahan baku substitusi impor bisa diketahui keberadaanya oleh para pelaku industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur.

k) Meningkatkan promosi value proposition produk-produk Jawa Timur.

l) Meningkatkan daya saing produk-produk industri dan pangan Jawa Timur

m) Membangun kerjasama jangka panjang dengan provinsi mitra untuk memasok barang kebutuhan strategis